

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 angka 2 Undang-Undang Nomor ... Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Riau;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Gugus Pulau-Pulau Kecil Terluar Provinsi Riau yang selanjutnya disebut Gugus PPKT Provinsi Riau adalah PPKT di Provinsi Riau yang terdiri atas Pulau Batamandi, Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.
2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
3. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.

4. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Pulau-Pulau Kecil Terluar yang selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha terkait pemanfaatan ruang laut.
9. Kawasan Strategis Nasional Tertentu adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
10. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
11. Struktur Ruang Laut adalah susunan pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

12. Pola Ruang Laut adalah distribusi peruntukan ruang dalam wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
13. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
14. Kawasan Konservasi adalah Kawasan laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan ruang laut secara berkelanjutan yang setara dengan kawasan lindung dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
15. Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk Alur Pelayaran, pipa dan/atau kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
16. Alur Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
17. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
18. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
19. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang laut dan ketentuan pengendaliannya untuk setiap Kawasan/Zona peruntukan.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak

berbadan hukum, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian zonasi.

21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Wilayah perencanaan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau meliputi wilayah perairan di sekitar Gugus PPKT Provinsi Riau, dengan ketentuan:
 - a. untuk Pulau Batamandi wilayah perairan yang berbatasan dengan wilayah pesisir yang bukan PPKT yang berada dalam jarak paling jauh 24 (dua puluh empat) mil Laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dan memperhatikan prinsip kesatuan Ekosistem; dan
 - b. batas wilayah perencanaan ditarik dari garis pantai yang menghadap laut teritorial sampai batas laut teritorial.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Peran

Pasal 3

RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berperan sebagai:

- a. alat operasionalisasi rencana tata ruang laut; dan
- b. alat koordinasi dan/atau pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 4

RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berfungsi untuk:

- a. penyusunan rencana kegiatan;
- b. pemanfaatan ruang laut dan pengendalian pemanfaatan ruang laut;
- c. perwujudan keterpaduan dan keserasian kepentingan lintas sektor; dan
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Tujuan Perencanaan Ruang Laut

Pasal 5

RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Kawasan pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem; dan
- c. Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis pariwisata dan perikanan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Perencanaan Ruang Laut

Pasal 6

- (1) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pertahanan dan keamanan yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penegasan dan pengamanan batas wilayah negara; dan
 - b. pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (2) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan perlindungan lingkungan hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
- a. penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi;
 - b. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Konservasi; dan
 - c. pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana.
- (3) Kebijakan untuk mewujudkan Kawasan pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat berbasis pariwisata dan perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu;
 - b. pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat; dan
 - c. peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan.

Bagian Ketiga

Strategi Perencanaan Ruang Laut

Pasal 7

- (1) Strategi penegasan dan pengamanan batas wilayah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menjaga dan mengamankan posisi titik dasar dan titik referensi;

- b. menetapkan rencana Pola Ruang Laut untuk Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama; dan
 - c. menempatkan dan memelihara tanda batas negara.
- (2) Strategi pengembangan prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi menempatkan dan/atau membangun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan.
- (3) Strategi penetapan dan/atau pengelolaan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. menetapkan rencana Pola Ruang Laut untuk Kawasan Konservasi;
 - b. menetapkan rencana pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi;
 - c. menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan Konservasi;
 - d. melaksanakan pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan rencana pengelolaan dan zonasi;
 - e. mempertahankan Ekosistem terumbu karang dan asosiasinya dan mangrove;
 - f. membangun prasarana dan sarana pengelolaan Kawasan Konservasi yang mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata;
 - g. mengendalikan kegiatan atau aktivitas yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut; dan
 - h. menyelaraskan, menyerasikan, dan menyeimbangkan pengelolaan Kawasan Konservasi dengan Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut.
- (4) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut; dan
 - b. mengendalikan pemanfaatan ruang laut di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Alur Laut yang dapat mengganggu Ekosistem atau kehidupan biota laut.
- (5) Strategi pengendalian pengembangan di Kawasan Pemanfaatan Umum untuk melindungi Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengendalikan pemanfaatan ruang laut pada Kawasan Pemanfaatan Umum yang berada di Kawasan rawan abrasi;
 - b. perlindungan Ekosistem dan mitigasi bencana; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang yang berpotensi merusak sempadan pantai dan menyebabkan kemunduran garis pantai.
- (6) Strategi pembangunan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. membangun prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian Masyarakat; dan
 - b. meningkatkan jaringan dan pelayanan transportasi laut.
- (7) Strategi pembangunan Kawasan Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi antarwilayah dan mendukung mata pencaharian Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yakni menentukan rencana Pola Ruang Laut untuk kegiatan:
- a. pariwisata;
 - b. Pelabuhan nasional;
 - c. perikanan tangkap; dan
 - d. perikanan budidaya.
- (8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan keserasian antarkegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi menyelaraskan, menyeraskan, dan menyeimbangkan antarkegiatan di dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, dan Alur Laut.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang Laut RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau meliputi:
 - a. sistem jaringan prasarana dan sarana laut; dan
 - b. rencana konektivitas.
- (2) Sistem jaringan prasarana dan sarana laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tatanan kepelabuhanan nasional.
- (3) Rencana konektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan transportasi laut.
- (4) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan rencana tata ruang dan rencana zonasi.

Pasal 9

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. Pelabuhan pengumpan regional; dan
 - b. Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Tanjung Medang di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis.
- (3) Pelabuhan laut yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis; dan

- b. rencana Pelabuhan Tanjung Medang di Pulau Rupert, Kabupaten Bengkalis.
- (4) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi:

- a. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Medang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan Pelabuhan Pengumpul Bengkalis di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis; dan
- b. Alur Pelayaran dan Perlintasan yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan Pelabuhan di Negara Malaysia.

Pasal 11

Rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Rencana Pola Ruang Laut RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau meliputi:

- a. Pola Ruang Laut Pulau Batamand; dan
- b. Pola Ruang Laut Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.

Bagian Kedua
Pola Ruang Laut Pulau Batamandi

Pasal 13

Pola Ruang Laut Pulau Batamandi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 14

- (1) Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a berupa Zona U8 yang merupakan Zona perikanan tangkap.
- (2) Zona U8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di sebagian perairan sekitar Pulau Batamandi.

Pasal 15

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b berupa indikasi Kawasan Konservasi yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Batamandi.
- (2) Penetapan indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Kawasan Konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi:
 - a. alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran dan Perlindungan; dan
 - b. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut, yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Batamandi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur T1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pola Ruang Laut Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang

Pasal 17

Pola Ruang Laut Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Kawasan Konservasi; dan
- c. Alur Laut.

Pasal 18

Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. Zona U1 yang merupakan Zona pariwisata;
- b. Zona U3 yang merupakan Zona Pelabuhan nasional;
- c. Zona U8 yang merupakan Zona perikanan tangkap;
- d. Zona U9 yang merupakan Zona perikanan budidaya;
- e. Zona U17 yang merupakan Zona pengelolaan Ekosistem pesisir; dan
- f. Zona U18 yang merupakan Zona pertahanan dan keamanan.

Pasal 19

Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis.

Pasal 20

Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa area pengembangan:

- a. Pelabuhan Tanjung Medang yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupat;

- b. rencana Pelabuhan Tanjung Medang yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupert; dan
- c. Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Bengkalis.

Pasal 21

Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.

Pasal 22

Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupert dan Pulau Bengkalis.

Pasal 23

Zona U17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.

Pasal 24

- (1) Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f berupa area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi.
- (2) Area untuk perlindungan titik dasar dan titik referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupert, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.

Pasal 25

- (1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b berupa indikasi Kawasan Konservasi yang berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupert.
- (2) Penetapan indikasi Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Kawasan Konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:

- a. alur T1.2 yang merupakan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
- b. alur T1.3 yang merupakan bagan pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme*) Selat Malaka; dan
- c. alur T3 yang merupakan alur kabel bawah laut.

Pasal 27

- (1) Alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. alur T1.2 yang menghubungkan Pelabuhan Tanjung Medang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan Pelabuhan Pengumpul Bengkalis di Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis; dan
 - b. alur T1.2 yang menghubungkan Pelabuhan Internasional Bandar Sri Setia Raja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dengan Pelabuhan di Negara Malaysia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur T1.2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Alur T1.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berada di sebagian perairan sekitar Pulau Rupat, Pulau Bengkalis, dan Pulau Rangsang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alur T1.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c berada di sebagian perairan Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 30

- (1) Rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 29 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Rincian luas beserta daftar koordinat rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

Pasal 31

- (1) Rencana pemanfaatan ruang laut merupakan upaya perwujudan RZ yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama pemanfaatan ruang laut dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usulan program utama;
 - b. lokasi program;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. pelaksana program; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 32

- (1) Program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dan lokasi program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan melalui penjabaran dan keterkaitan kebijakan dan strategi pengelolaan.

Pasal 33

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah.
- (2) Ketentuan mengenai sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pelaksana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah daerah; dan/atau
- c. Masyarakat.

Pasal 35

- (1) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e disusun berdasarkan program utama dan kapasitas pendanaan yang ada dalam waktu 20 (dua puluh) tahun yang dibagi ke dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) tahapan yang meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode 2020–2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025–2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030–2034; dan
 - d. tahap keempat pada periode 2035–2039.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi pelaksana program untuk menetapkan program utama pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus PPKT Provinsi Riau.

Pasal 36

Rincian indikasi program utama rencana pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB VII

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus PPKT Provinsi Riau merupakan acuan dalam pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang;
 - b. perizinan;
 - c. insentif dan disinsentif; dan
 - d. sanksi.

Bagian Kedua

Peraturan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 38

- (1) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang disusun berdasarkan Kawasan, Zona, atau Alur Laut.
- (2) Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut; dan

- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut.
- (3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Struktur Ruang Laut

Pasal 39

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Struktur Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a merupakan Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas.

Pasal 40

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. pembangunan Pelabuhan dan/atau dermaga serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjangnya atau revitalisasi Pelabuhan dan/atau dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepelabuhanan;
 - 4. penempatan dan/atau pemasangan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 5. pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran;
 - 6. pemeliharaan lebar dan kedalaman Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 - 7. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;

8. penyelenggaraan kenavigasian pada Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan/atau
9. pembatasan kecepatan kapal yang bernavigasi pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang melintasi Kawasan Konservasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak fungsi fasilitas pokok dan fasilitas penunjang Pelabuhan dan/atau dermaga;
 2. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak sarana bantu navigasi pelayaran;
 3. pendirian, penempatan, dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut yang mengganggu Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 4. kegiatan yang mengganggu ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan/atau
 5. kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan rencana konektivitas.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Rencana Pola Ruang Laut

Pasal 41

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada rencana Pola Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi; dan

- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut.

Pasal 42

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9;
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U17; dan
- f. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U18.

Pasal 43

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. penyediaan prasarana dan sarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - 4. pembangunan prasarana dan sarana dasar;
 - 5. penyediaan akses terhadap pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - 6. penangkapan ikan tradisional;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan bangunan pengamanan pantai dan/atau pos penjagaan pantai;
 - 2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan yang dilakukan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata;
 - 3. labuh jangkar kapal;
 - 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 - 5. penyelenggaraan mitigasi bencana; dan
 - 6. pembangunan prasarana dan sarana wisata;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. perikanan budidaya;

2. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis dan pasif;
3. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan/atau merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
4. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 44

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan bongkar muat kapal penumpang dan/atau kapal barang;
 4. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 5. penyediaan fasilitas sandar kapal;
 6. penyediaan perairan tempat labuh;
 7. penyediaan kolam Pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 8. pengembangan Pelabuhan jangka panjang;
 9. penyediaan fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
 10. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan darurat;
 11. pengalokasian ruang perairan tempat labuh jangkar;
 12. pengalokasian ruang perairan pandu;
 13. kepelabuhanan dan/atau kenavigasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran;
 14. operasional Pelabuhan;
 15. penunjang operasional Pelabuhan;
 16. pengembangan Kawasan peruntukan Pelabuhan;
 17. pertahanan dan keamanan; dan

18. pengalokasian ruang perairan untuk keperluan pemeliharaan lebar dan kedalaman alur;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. pembangunan bangunan pengamanan pantai;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan; dan
 5. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan, dan Alur Pelayaran dan Perlintasan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pembuangan sampah dan limbah; dan
 2. kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona U3.

Pasal 45

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan dilaksanakan berdasarkan jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penangkapan ikan yang meminimalkan jumlah tangkapan samping;
 5. penangkapan ikan yang tidak melebihi potensi lestariannya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
 6. perlindungan pesisir pantai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat pasif untuk mendukung kegiatan pariwisata yang diperbolehkan hanya pancing ulur, pancing berjoran, pancing cumi (*squid angling*), pancing layang-layang, tombak (*harpoons*), ladung, dan panah;
 2. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 3. perikanan budidaya; dan
 4. penyelenggaraan, pengoperasian, dan perawatan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dan/atau merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. pertambangan; dan
 3. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan budidaya laut skala kecil dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. penangkapan ikan pelagis dan demersal skala kecil pada kolom air;
 5. pelaksanaan budidaya laut dengan menggunakan teknologi semi intensif; dan
 6. penempatan keramba jaring apung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. penyelenggaraan dan pengoperasian Alur Pelayaran dan Perlintasan untuk kegiatan perikanan budidaya;
 2. pelaksanaan budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat, dan teknologi yang tidak merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 3. pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan koefisien pemanfaatan perairan sebesar maksimal 80% (delapan puluh persen) dari luas Kawasan Pemanfaatan Umum;
 4. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit; dan
 5. pengembangan pariwisata dan rekreasi dengan prasarana dan sarana yang bersifat menetap;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. pelaksanaan budidaya yang menggunakan metode, alat, dan teknologi yang dapat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 2. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 3. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius, dan/atau bahan beracun, serta alat penangkapan ikan yang bersifat merusak Ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 4. pertambangan;
 5. kegiatan nonperikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 6. penggunaan pakan ikan untuk budidaya ikan secara berlebihan; dan
 7. pembuangan sampah dan limbah ke laut.

Pasal 47

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Zona U17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 - 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 - 3. pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan perlindungan lingkungan dan sumber daya alam, kelautan dan perikanan, ekowisata, dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan;
 - 4. pelaksanaan rehabilitasi mangrove dan lingkungan pesisir;
 - 5. pelaksanaan konservasi perairan, pesisir, dan perlindungan biota laut;
 - 6. perlindungan dan pemanfaatan Ekosistem untuk kegiatan pendidikan, nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil;
 - 7. perlindungan situs budaya/adat tradisional; dan
 - 8. pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana pengaman pantai atau Ekosistem sebagai penahan abrasi, dan pengendalian banjir; dan
 - 2. pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan daya dukung dan daya tampung wilayah perairan Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus PPKT Provinsi Riau;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan perubahan fungsi Ekosistem;
 - 2. kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumber daya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - 3. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang merusak Ekosistem;
 - 4. penebangan dan perusakan mangrove; dan
 - 5. pembuangan sampah dan limbah.

Peraturan pemanfaatan ruang laut untuk Zona U18 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pertahanan dan keamanan;
 4. pengamanan posisi titik dasar dan/atau titik referensi;
 5. penangkapan ikan yang tidak mengganggu fungsi Zona U18; dan
 6. pemanfaatan lainnya yang mendukung fungsi Zona U18;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan wilayah perairan yang sejalan, tidak mengganggu dan mengubah fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 2. pemanfaatan wilayah perairan diluar fungsi pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang mengganggu fungsi Zona U18.

Pasal 49

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.3; dan
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3.

Pasal 51

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T1.2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan alur

T1.3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pelaksanaan bagan pemisah lalu lintas (*traffic separation scheme*) Selat Malaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan;
 5. pengerukan Alur Pelayaran dan Perlintasan;
 6. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran;
 7. penangkapan ikan menggunakan alat penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. pemanfaatan Alur Pelayaran dan Perlintasan oleh Masyarakat; dan
 9. pelaksanaan dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan untuk mendukung Alur Pelayaran dan Perlintasan nelayan; dan
 2. pemanfaatan untuk mendukung Alur Pelayaran dan Perlintasan khusus lain dengan mempertimbangkan penyelenggaraan kenavigasian dan keselamatan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan lain yang mengganggu fungsi alur T1.2 dan T1.3;
 2. pembangunan permukiman;
 3. pertambangan;
 4. pembangunan bangunan dan instalasi di laut selain untuk fungsi navigasi;
 5. pembuangan sampah dan limbah;

6. wisata bawah laut;
7. wisata olahraga air;
8. perikanan budidaya; dan
9. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis.

Pasal 52

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk alur T3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. penelitian dan/atau pendidikan;
 2. pemantauan dan/atau evaluasi;
 3. pemasangan, penggelaran, dan pemeliharaan pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. kegiatan operasional dan kegiatan penunjang alur T3;
 5. kegiatan penangkapan ikan pelagis dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat aktif;
 6. pelaksanaan konservasi sumber daya ikan dan sumber daya kelautan;
 7. penempatan sarana bantu navigasi pelayaran; dan
 8. penetapan Zona keamanan dan keselamatan di sekitar alur T3;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. wisata bahari;
 2. pembudidayaan ikan;
 3. pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut di sekitar pipa dan/atau kabel bawah laut;
 4. kegiatan yang aman bagi instalasi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut; dan
 5. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi jaringan pipa dan/atau kabel bawah laut;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. pertambangan;

2. kegiatan penangkapan ikan demersal dengan alat penangkapan ikan bergerak atau ditarik;
3. labuh jangkar;
4. pemasangan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan
5. kegiatan yang mengganggu fungsi alur T3.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 53

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf c dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut dilaksanakan untuk:

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang laut dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau;
- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang laut di Gugus PPKT Provinsi Riau agar sejalan dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang laut di Gugus PPKT Provinsi Riau yang sejalan dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.

Paragraf 2

Insentif

Pasal 55

- (1) Insentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh:
 - a. pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; dan
 - b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang diprioritaskan pengembangannya.

Pasal 56

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana;
- b. penghargaan; dan/atau
- c. publikasi atau promosi.

Pasal 57

- (1) Insentif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - b. penghargaan dan fasilitasi; dan/atau
 - c. publikasi atau promosi daerah.
- (2) Insentif dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b berupa penyediaan prasarana dan sarana.

Paragraf 3

Disinsentif

Pasal 58

- (1) Disinsentif untuk kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut diberikan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada ruang laut yang dibatasi pengembangannya.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - b. pemberitahuan kinerja negatif kepada publik.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 59

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf d diberikan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai dengan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan dan perolehan dokumen;
 - b. pertukaran data dan informasi; dan
 - c. tindak lanjut laporan/pengaduan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana Struktur Ruang Laut dan rencana Pola Ruang Laut dalam Peraturan Presiden ini.
- (5) Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang laut wajib memperhatikan kepentingan Masyarakat.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERAN MASYARAKAT

Pasal 61

Pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan ruang laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu Gugus PPKT Provinsi Riau dapat secara aktif melibatkan Masyarakat.

Pasal 62

Peran Masyarakat dalam perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dilakukan pada tahap:

- a. perencanaan zonasi;
- b. pemanfaatan ruang laut; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang laut.

Pasal 63

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. memberikan masukan dalam:
 - 1. persiapan penyusunan RZ;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau Kawasan;

3. identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RZ; dan
 5. penetapan RZ.
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat.

Pasal 64

Bentuk peran Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang laut;
- b. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam pemanfaatan ruang laut;
- c. melakukan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam upaya pelindungan lingkungan;
- d. memanfaatkan ruang laut yang sesuai dengan kearifan lokal dan RZ yang telah ditetapkan;
- e. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang laut dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan; dan
- g. melakukan investasi dalam pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:

- a. memberikan masukan terkait pelaksanaan Peraturan Pemanfaatan Ruang, perizinan, insentif, dan disinsentif, dan/atau sanksi;

- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan RZ yang telah ditetapkan;
- c. memberikan laporan kepada kementerian, lembaga, dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RZ yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZ.

Pasal 66

Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Menteri dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X

JANGKA WAKTU DAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 67

- (1) RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau berlaku selama 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Presiden ini.
- (2) Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi:
 - a. perubahan kebijakan nasional yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

- (4) Peninjauan kembali RZ KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini, ketentuan mengenai alokasi ruang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Riau yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

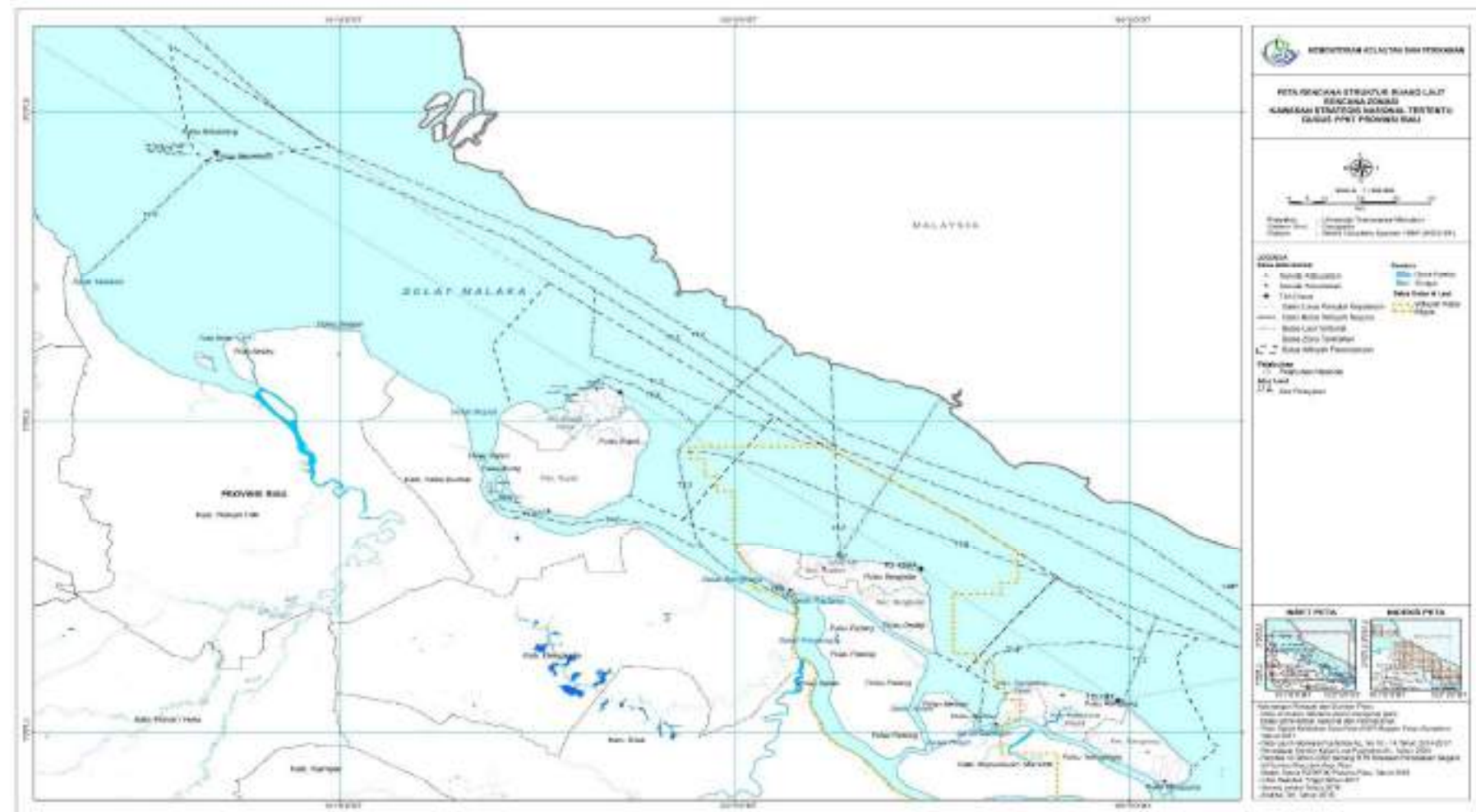
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

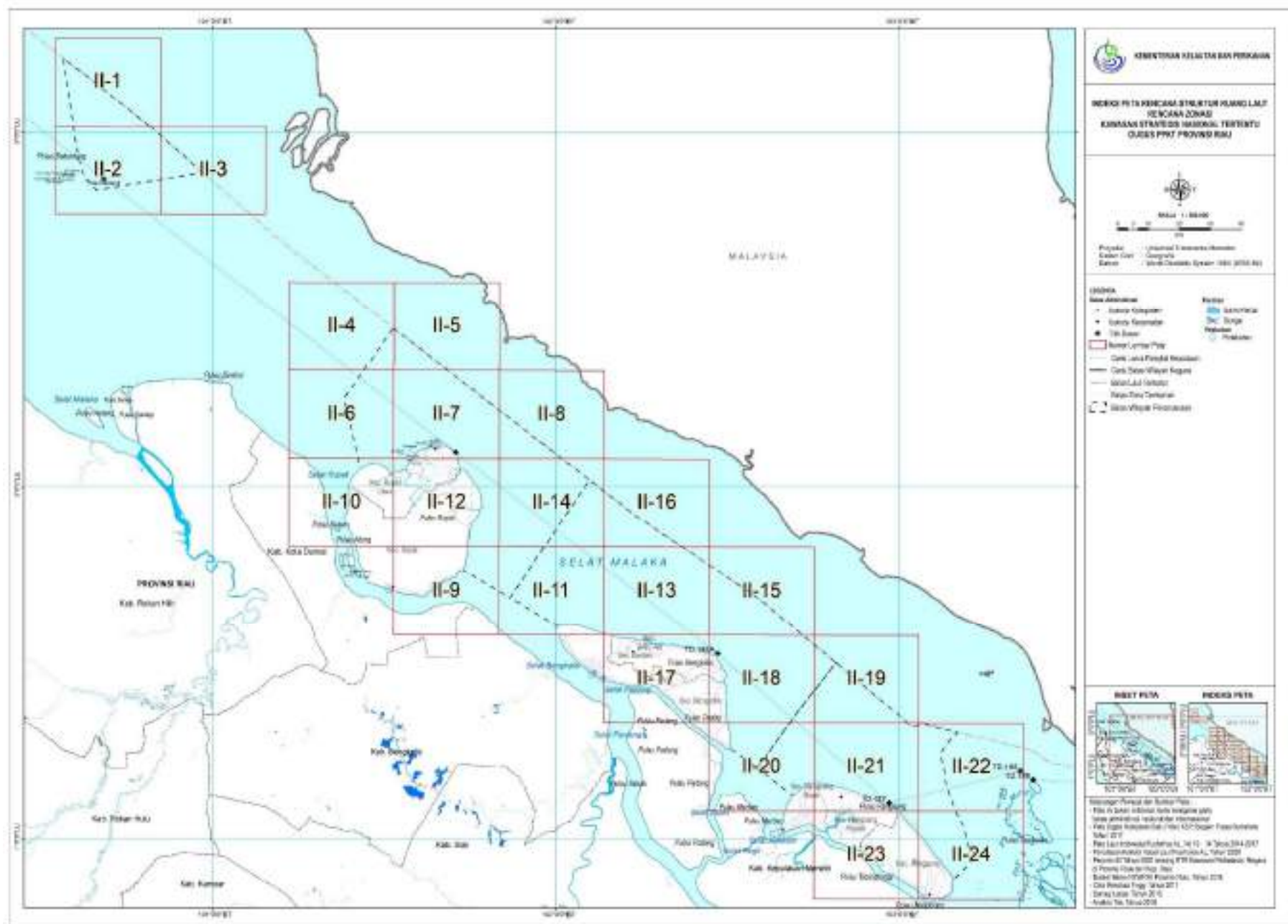
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



INDEKS PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT



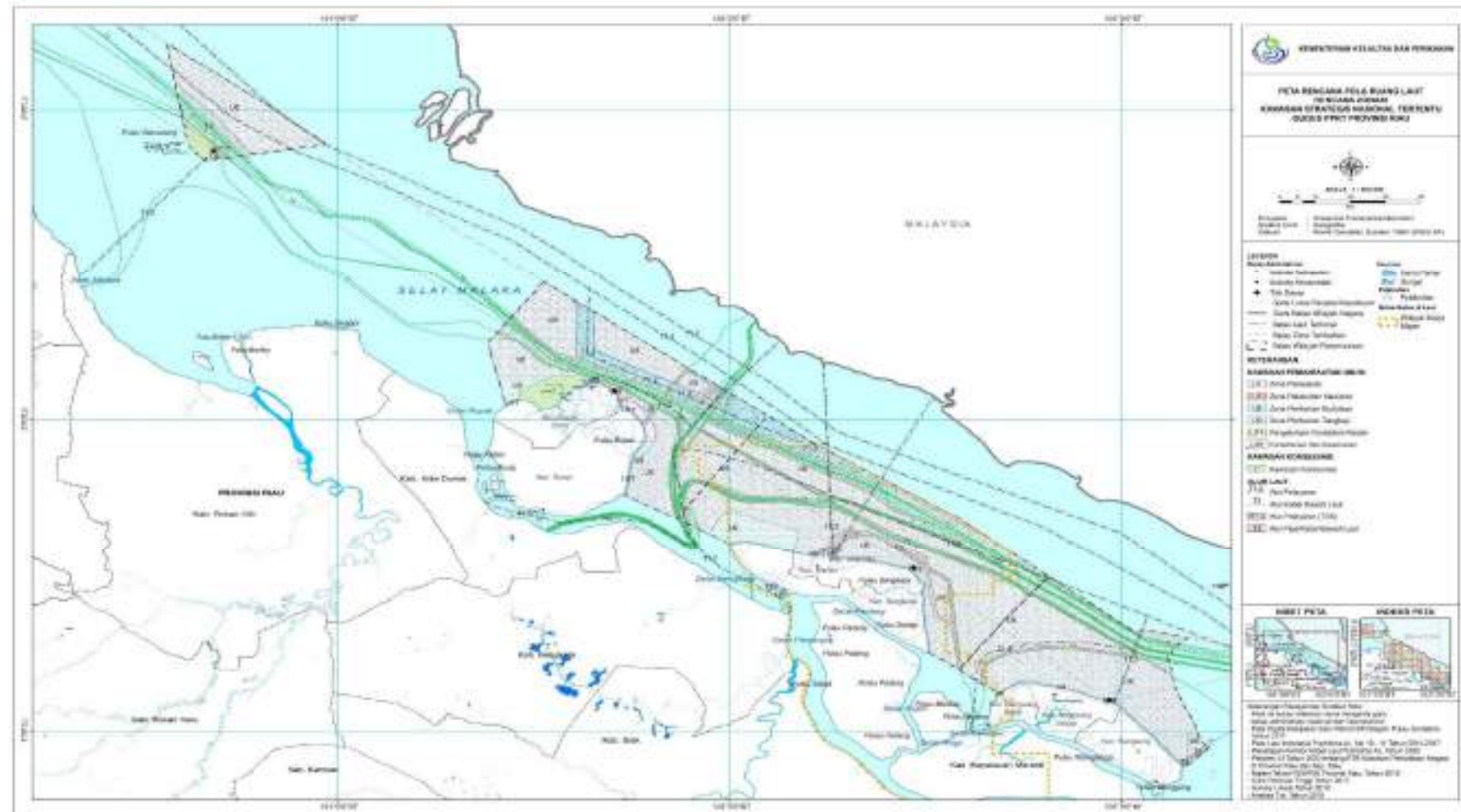
The map displays the planned road network for the Bontolungga District. It features a grid of latitude and longitude coordinates. The legend identifies various road types, including National Roads, Provincial Roads, District Roads, and Village Roads. It also shows administrative boundaries, such as District and Village boundaries, and geographical features like rivers and water bodies. The map is titled 'PETA RENCANA STRUKTUR RUANG LUT BONTOLUNGGA DISTRICT KABUPATEN BONTOLUNGGA PROVINSI SULAWESI UTARA' and includes a scale bar and a north arrow.

[illegible]

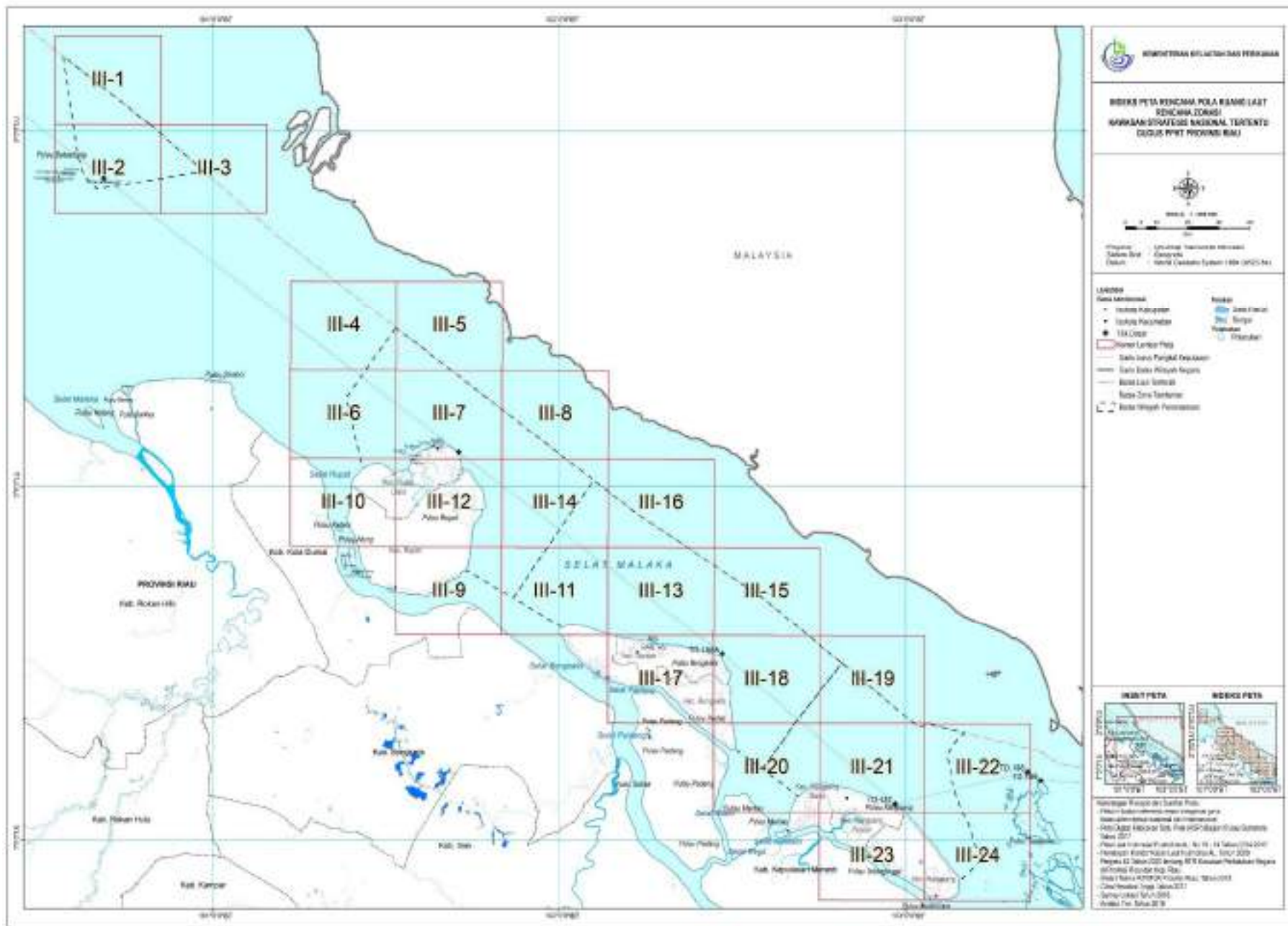
JOKO WIDODO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT

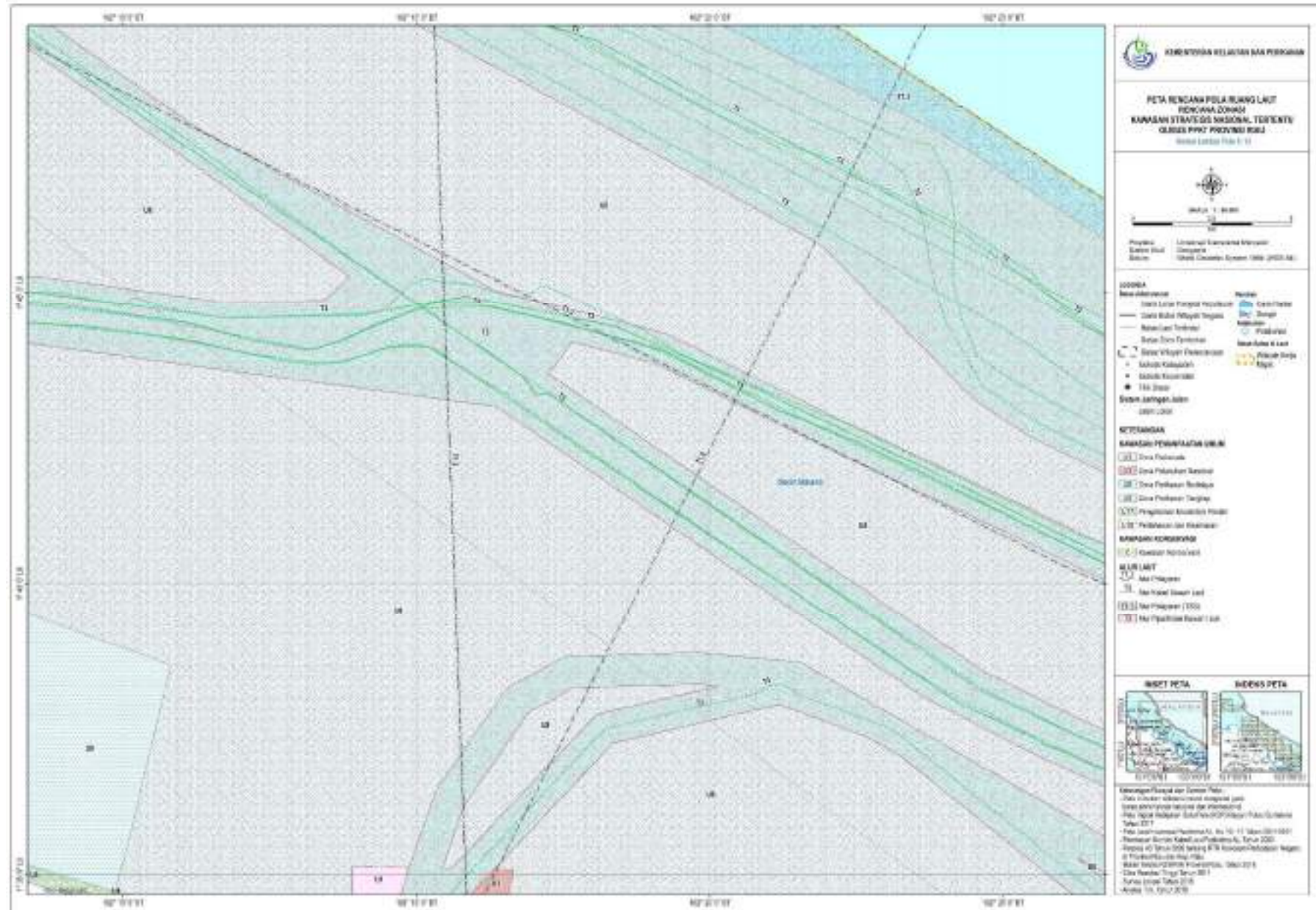


INDEKS PETA RENCANA POLA RUANG LAUT



[illegible]

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT NOMOR LEMBAR PETA III-13



**PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
KECAMATAN STRATEGIS MASONG, KABUPATEN
PANGASINAN, PROVINSI ILOCOS NORT**

Skala 1:50,000

Proyeksi: UTM
Datum: WGS 84
Sistem Koordinat: UTM
Datum: WGS 84

LEGENDA

Batas Wilayah

— Garis Laut Teritorial
— Garis Basal Wilayah Eksternal
— Garis Laut Teritorial
— Garis Zona Teritorial
— Garis Pulau Teritorial
— Garis Kepulauan
— Garis Kepulauan
— Garis Kepulauan
— Garis Kepulauan

Simbol

— Garis Laut Teritorial
— Garis Basal Wilayah Eksternal
— Garis Laut Teritorial
— Garis Zona Teritorial
— Garis Pulau Teritorial
— Garis Kepulauan
— Garis Kepulauan
— Garis Kepulauan
— Garis Kepulauan

KETERANGAN

KAWASAN PERENCANAAN LAUT

— Zona Perikanan
— Zona Perikanan
— Zona Perikanan
— Zona Perikanan
— Zona Perikanan
— Zona Perikanan
— Zona Perikanan
— Zona Perikanan

KAWASAN KAWASAN

— Kawasan KAWASAN
— Kawasan KAWASAN
— Kawasan KAWASAN
— Kawasan KAWASAN

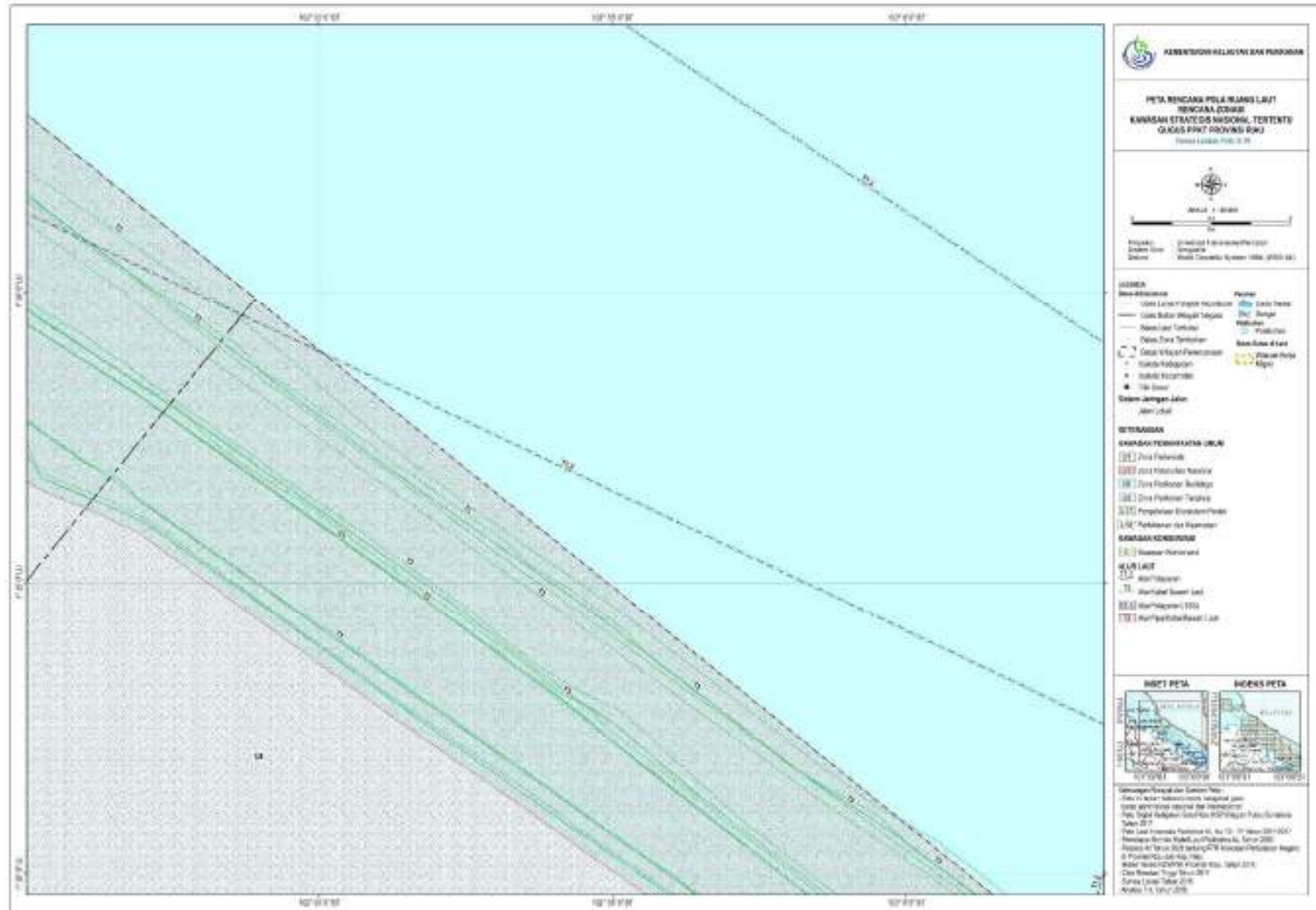
ALUR LAUT

— Alur Laut
— Alur Laut
— Alur Laut
— Alur Laut

DAFTAR PUSTAKA

— Daftar Pustaka
— Daftar Pustaka
— Daftar Pustaka
— Daftar Pustaka

PETA RENCANA POLA RUANG LAUT
NOMOR LEMBAR PETA III-19



[illegible]

[illegible]

JOKO WIDODO

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU

RINCIAN LUAS BESERTA DAFTAR KOORDINAT RENCANA POLA RUANG LAUT

A. RINCIAN LUAS

KAWASAN	ZONA	KODE	LUAS (Ha)
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	6.235,72
	Pelabuhan Nasional	U3	488,66
	Perikanan Tangkap	U8	545.622,18
	Perikanan Budidaya	U9	30.025,86
	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	9.550,81
	Pertahanan dan Keamanan	U18	789,88
Kawasan Konservasi	Kawasan Konservasi	C	19.201,13
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	53.045,90
	Alur Kabel Bawah Laut	T3	223.884,38
Total Luas			888.844,51

B. DAFTAR KOORDINAT

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	190.086,83	Perairan Laut Selat Malaka	101	33	33,470	2	13	4,772
		T3			101	36	51,100	2	11	48,971
		T3			101	37	44,524	2	11	49,897
		T3			101	38	17,882	2	11	37,047
		T3			101	39	24,164	2	10	59,265
		T3			101	50	16,142	2	5	20,049
		T3			101	52	12,164	2	8	31,709
		T3			101	53	37,411	2	10	11,262
		T3			101	54	3,395	2	9	51,722
		T3			101	52	38,437	2	8	12,605
		T3			101	50	44,951	2	5	5,049
		T3			101	53	14,370	2	3	47,253
		T3			101	53	34,620	2	3	36,709
		T3			101	57	39,476	2	7	9,228
		T3			101	58	6,019	2	6	49,267
		T3			101	54	4,832	2	3	19,934
		T3			101	54	55,458	2	2	51,480
		T3			101	55	53,144	2	4	19,815
		T3			101	58	11,614	2	6	45,060
		T3			101	58	37,731	2	6	25,420
		T3			101	56	18,250	2	3	59,168
		T3			101	55	23,780	2	2	35,563
		T3			101	56	19,129	2	2	4,454
		T3			101	58	55,046	2	6	12,399
		T3			101	59	20,979	2	5	52,897
		T3			101	56	47,419	2	1	48,554
		T3			101	57	3,450	2	1	39,693
		T3			101	59	29,040	2	5	46,835
		T3			101	59	55,183	2	5	27,176

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			101	57	31,920	2	1	24,182
		T3			101	58	52,887	2	0	40,069
		T3			101	59	16,700	2	2	51,694
		T3			101	59	58,159	2	4	44,874
		T3			101	59	58,471	2	4	59,936
		T3			102	0	0,925	2	5	9,998
		T3			102	0	0,723	2	5	20,002
		T3			102	0	5,357	2	4	56,964
		T3			101	59	45,050	2	2	27,626
		T3			101	59	25,401	2	0	42,333
		T3			101	59	24,427	2	0	22,885
		T3			102	3	4,635	1	57	58,142
		T3			102	9	2,366	1	54	51,004
		T3			102	23	55,631	1	47	45,340
		T3			102	39	25,854	1	37	35,504
		T3			103	2	0,308	1	19	6,000
		T3			103	4	4,769	1	19	30,000
		T3			103	10	11,018	1	18	5,006
		T3			103	9	2,792	1	17	10,294
		T3			103	8	6,066	1	16	17,957
		T3			103	7	4,016	1	15	20,393
		T3			103	7	0,477	1	14	18,287
		T3			103	7	3,751	1	11	46,486
		T3			103	7	6,601	1	10	28,389
		T3			103	7	7,732	1	10	35,916
		T3			103	7	2,490	1	10	45,111
		T3			103	4	9,396	1	13	19,397
		T3			103	4	0,047	1	13	37,904
		T3			103	1	5,503	1	14	28,838
		T3			102	58	33,167	1	14	49,216
		T3			102	53	15,244	1	15	45,784

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			102	47	54,388	1	15	50,899
		T3			102	42	43,181	1	14	53,314
		T3			102	40	5,090	1	13	30,348
		T3			102	39	20,847	1	12	49,649
		T3			102	39	0,403	1	11	25,225
		T3			102	39	14,832	1	8	55,095
		T3			102	38	39,813	1	9	21,345
		T3			102	38	27,943	1	11	24,834
		T3			102	38	51,954	1	13	5,837
		T3			102	39	47,348	1	13	57,716
		T3			102	42	33,944	1	15	24,675
		T3			102	47	51,632	1	16	23,418
		T3			102	53	17,118	1	16	18,315
		T3			102	58	37,634	1	15	21,468
		T3			103	1	1,870	1	15	0,850
		T3			103	2	2,263	1	14	47,115
		T3			103	2	4,870	1	14	55,469
		T3			103	1	3,269	1	15	28,733
		T3			102	58	5,033	1	17	53,030
		T3			102	51	18,911	1	22	38,178
		T3			102	46	58,677	1	25	48,605
		T3			102	46	16,434	1	26	10,141
		T3			102	45	4,688	1	26	41,039
		T3			102	44	59,958	1	26	46,234
		T3			102	44	46,401	1	27	14,104
		T3			102	44	28,726	1	27	36,197
		T3			102	43	44,240	1	28	1,747
		T3			102	42	45,035	1	28	41,084
		T3			102	33	33,419	1	33	19,987
		T3			102	25	34,838	1	37	2,376
		T3			102	23	40,907	1	38	1,307

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			102	16	21,332	1	43	2,520
		T3			102	7	7,059	1	44	14,924
		T3			102	2	1,780	1	44	20,721
		T3			102	1	0,852	1	44	32,798
		T3			101	59	53,563	1	45	9,986
		T3			101	58	17,844	1	46	22,022
		T3			101	57	14,002	1	47	2,880
		T3			101	55	58,251	1	47	40,756
		T3			101	54	54,508	1	47	56,692
		T3			101	54	24,938	1	48	0,944
		T3			101	54	21,229	1	48	0,327
		T3			101	52	53,692	1	44	40,926
		T3			101	54	10,014	1	39	44,671
		T3			101	52	0,242	1	41	0,967
		T3			101	51	38,052	1	41	54,845
		T3			101	51	36,107	1	42	24,301
		T3			101	51	17,489	1	43	21,593
		T3			101	51	3,474	1	45	39,617
		T3			101	50	51,475	1	46	44,525
		T3			101	50	42,926	1	48	26,777
		T3			101	50	47,379	1	49	1,371
		T3			101	50	44,633	1	50	12,469
		T3			101	50	57,554	1	51	55,531
		T3			101	51	19,377	1	53	26,709
		T3			101	51	21,832	1	53	51,054
		T3			101	51	20,250	1	54	14,476
		T3			101	51	30,036	1	54	39,266
		T3			101	52	4,092	1	58	24,501
		T3			101	51	59,868	1	59	15,949
		T3			101	51	45,127	1	59	56,169
		T3			101	51	44,196	2	0	14,510

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			101	51	46,394	2	0	26,338
		T3			101	49	3,745	2	2	17,787
		T3			101	46	47,799	1	58	33,110
		T3			101	46	41,969	1	59	3,367
		T3			101	46	35,825	1	59	15,930
		T3			101	48	38,014	2	2	37,872
		T3			101	42	58,818	2	6	29,320
		T3			101	38	32,051	2	8	38,380
		T3			101	35	27,408	2	9	38,514
		T3			101	34	53,899	2	9	32,570
		T3			101	34	21,073	2	9	41,913
		T3			101	34	13,989	2	9	46,635
		T3			101	34	6,297	2	9	58,964
		T3			101	33	13,788	2	10	21,879
		T3			101	32	38,200	2	10	33,281
		T3			101	31	58,659	2	10	50,128
		T3			101	31	30,430	2	11	14,787
		T3			101	27	45,518	2	15	8,424
		T3			101	26	9,428	2	16	6,913
		T3			101	24	27,163	2	16	50,553
		T3			101	26	55,067	2	20	15,086
		T3			101	27	55,655	2	18	56,787
		T3			101	29	52,698	2	16	41,391
		T3			101	30	38,541	2	15	59,779
		T3			101	31	50,923	2	14	38,890
		T3			101	33	33,470	2	13	4,772
		T3			101	56	7,615	1	58	6,762
		T3			101	58	51,760	1	56	14,980
		T3			102	3	6,255	1	52	47,929
		T3			102	8	0,981	1	49	45,820
		T3			102	11	15,424	1	47	50,007

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			102	16	20,914	1	45	1,879
		T3			102	19	13,854	1	44	18,104
		T3			102	22	23,251	1	42	44,085
		T3			102	27	49,256	1	40	7,616
		T3			102	28	18,445	1	40	56,621
		T3			102	27	1,267	1	41	45,734
		T3			102	25	27,083	1	42	31,449
		T3			102	24	28,510	1	43	10,970
		T3			102	21	54,946	1	45	48,376
		T3			102	14	13,715	1	50	1,645
		T3			102	13	5,773	1	50	36,289
		T3			102	11	27,223	1	51	36,197
		T3			102	7	2,446	1	53	38,225
		T3			102	6	9,292	1	54	27,336
		T3			102	4	4,656	1	55	6,776
		T3			102	3	5,324	1	55	45,772
		T3			102	2	0,208	1	56	44,602
		T3			102	0	1,209	1	57	30,767
		T3			101	58	34,115	1	58	38,622
		T3			101	56	32,869	1	59	44,194
		T3			101	55	44,811	1	58	22,517
		T3			101	56	7,615	1	58	6,762
		T3			102	19	1,892	1	43	47,765
		T3			102	17	38,586	1	44	8,751
		T3			102	17	14,973	1	43	35,860
		T3			102	24	40,782	1	38	28,529
		T3			102	26	21,409	1	37	38,588
		T3			102	29	57,788	1	35	59,956
		T3			102	35	31,712	1	33	19,029
		T3			102	41	46,171	1	30	24,343
		T3			102	42	7,023	1	31	0,775

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			102	35	46,205	1	35	0,984
		T3			102	31	57,872	1	37	28,881
		T3			102	19	1,892	1	43	47,765
		T3			101	55	49,342	1	57	39,893
		T3			101	55	28,303	1	57	54,428
		T3			101	53	5,388	1	53	51,948
		T3			101	52	15,930	1	52	56,020
		T3			101	52	20,189	1	46	45,020
		T3			101	53	41,781	1	48	28,295
		T3			101	54	26,833	1	48	50,231
		T3			101	57	0,259	1	48	20,446
		T3			102	1	1,991	1	45	56,264
		T3			102	2	3,839	1	45	36,047
		T3			102	5	6,538	1	45	18,560
		T3			102	8	7,014	1	45	16,115
		T3			102	11	39,782	1	44	50,662
		T3			102	13	25,145	1	44	51,717
		T3			102	13	51,567	1	45	16,626
		T3			102	11	19,752	1	47	7,220
		T3			102	8	3,019	1	49	18,735
		T3			102	3	8,303	1	52	20,837
		T3			101	58	33,326	1	55	48,223
		T3			101	55	49,342	1	57	39,893
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	19.808,75	Perairan Laut Pulau Batu Mandi	100	47	0,520	2	51	26,171
		T3			100	42	27,507	2	50	41,673
		T3			100	42	32,220	2	50	52,529
		T3			100	41	28,349	2	52	4,814
		T3			100	41	49,005	2	52	27,043
		T3			100	37	10,364	2	56	34,104
		T3			100	36	20,191	2	57	34,360

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			100	35	5,801	3	5	29,310
		T3			100	42	12,727	2	57	45,232
		T3			100	47	0,520	2	51	26,171
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	12.963,11	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	21	31,195	1	38	38,438
		T3			102	30	7,767	1	33	40,563
		T3			102	30	13,785	1	33	30,824
		T3			102	30	28,972	1	31	52,309
		T3			102	33	46,397	1	29	12,469
		T3			102	33	51,719	1	29	3,837
		T3			102	34	5,583	1	27	25,842
		T3			102	34	6,907	1	26	26,937
		T3			102	34	13,744	1	25	0,512
		T3			102	35	9,118	1	15	37,901
		T3			102	35	24,354	1	13	15,178
		T3			102	35	40,953	1	11	33,874
		T3			102	35	3,673	1	12	1,319
		T3			102	34	52,296	1	13	10,788
		T3			102	34	37,023	1	15	33,839
		T3			102	33	59,903	1	20	17,229
		T3			102	31	31,606	1	22	4,691
		T3			102	31	25,529	1	22	13,347
		T3			102	29	58,923	1	31	34,848
		T3			102	23	15,696	1	37	1,259
		T3			102	22	38,274	1	37	22,880
		T3			102	21	10,962	1	37	55,048
		T3			102	18	20,439	1	37	15,259
		T3			102	15	2,967	1	33	44,488
		T3			102	14	37,616	1	33	44,890
		T3			102	14	31,633	1	33	47,662
		T3			102	14	26,076	1	33	46,090

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			102	14	26,768	1	33	50,609
		T3			102	15	18,971	1	36	25,041
		T3			102	16	33,819	1	38	12,406
		T3			102	17	34,036	1	38	44,446
		T3			102	19	48,257	1	38	48,560
		T3			102	21	31,195	1	38	38,438
		T3			102	15	26,469	1	35	6,151
		T3			102	15	35,708	1	35	5,960
		T3			102	15	52,478	1	35	23,996
		T3			102	18	3,012	1	37	43,535
		T3			102	20	8,604	1	38	13,919
		T3			102	19	47,334	1	38	15,984
		T3			102	17	40,087	1	38	12,101
		T3			102	16	53,955	1	37	46,471
		T3			102	15	48,077	1	36	10,468
		T3			102	15	26,469	1	35	6,151
		T3			102	26	15,991	1	35	17,096
		T3			102	29	51,572	1	32	22,585
		T3			102	29	43,126	1	33	17,425
		T3			102	26	15,991	1	35	17,096
		T3			102	31	56,003	1	22	27,130
		T3			102	34	6,502	1	20	52,565
		T3			102	33	44,300	1	24	22,496
		T3			102	33	34,593	1	26	25,192
		T3			102	33	33,672	1	27	18,656
		T3			102	33	21,315	1	28	50,995
		T3			102	31	15,715	1	30	32,681
		T3			102	30	36,322	1	31	4,573
		T3			102	31	56,003	1	22	27,130
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	266,07	Perairan Laut Pulau Rangsang	103	9	9,637	0	53	58,750

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T3			103	9	3,943	0	53	37,301
		T3			103	8	4,343	0	54	3,230
		T3			103	10	10,000	0	55	6,387
		T3			103	10	9,999	0	54	24,095
		T3			103	9	9,637	0	53	58,750
Alur Laut	Alur Kabel Bawah Laut	T3	759,63	Perairan Laut Pulau Rangsang	103	13	33,593	0	57	14,048
		T3			103	10	9,999	0	54	24,095
		T3			103	10	10,000	0	55	6,387
		T3			103	13	2,965	0	57	30,774
		T3			103	13	33,593	0	57	14,048
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	26.851,77	Perairan Laut Selat Malaka	102	35	0,000	1	41	12,000
		T1.3			102	39	25,854	1	37	35,504
		T1.3			102	23	55,631	1	47	45,340
		T1.3			102	9	2,366	1	54	51,004
		T1.3			102	3	4,635	1	57	58,142
		T1.3			101	59	24,427	2	0	22,885
		T1.3			101	59	25,401	2	0	42,333
		T1.3			101	59	45,050	2	2	27,626
		T1.3			102	0	0,401	2	3	46,682
		T1.3			102	0	5,357	2	4	56,964
		T1.3			102	13	33,231	1	55	12,000
		T1.3			102	35	0,000	1	41	12,000
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	1.361,12	Perairan Laut Selat Malaka	101	58	55,046	2	6	12,399
		T1.3			101	56	19,129	2	2	4,454
		T1.3			101	55	23,780	2	2	35,563
		T1.3			101	56	18,250	2	3	59,168
		T1.3			101	58	37,731	2	6	25,420
		T1.3			101	58	55,046	2	6	12,399

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	19.047,98	Perairan Laut Selat Malaka	101	51	25,102	2	7	14,019
		T1.3			101	50	16,142	2	5	20,049
		T1.3			101	39	24,164	2	10	59,265
		T1.3			101	38	18,379	2	11	36,796
		T1.3			101	37	42,077	2	11	50,033
		T1.3			101	36	43,816	2	12	24,405
		T1.3			101	36	46,383	2	22	4,691
		T1.3			101	36	11,907	2	23	19,588
		T1.3			101	39	25,883	2	20	53,070
		T1.3			101	39	14,040	2	13	36,957
		T1.3			101	51	25,102	2	7	14,019
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	2.688,16	Perairan Laut Selat Malaka	101	55	22,306	2	5	10,173
		T1.3			101	53	34,620	2	3	36,709
		T1.3			101	50	44,951	2	5	5,049
		T1.3			101	51	53,870	2	6	58,950
		T1.3			101	55	22,306	2	5	10,173
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	1.272,39	Perairan Laut Selat Malaka	101	59	16,700	2	2	51,694
		T1.3			101	58	52,887	2	0	40,069
		T1.3			101	57	31,920	2	1	24,182
		T1.3			101	59	55,183	2	5	27,176
		T1.3			102	0	0,723	2	5	20,002
		T1.3			102	0	0,925	2	5	9,998
		T1.3			101	59	58,471	2	4	59,936
		T1.3			101	59	58,159	2	4	44,874
		T1.3			101	59	16,700	2	2	51,694
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	393,73	Perairan Laut Selat Malaka	101	59	29,040	2	5	46,835
		T1.3			101	57	3,450	2	1	39,693
		T1.3			101	56	47,419	2	1	48,554

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		T1.3			101	59	15,776	2	5	45,412
		T1.3			101	59	20,979	2	5	52,897
		T1.3			101	59	29,040	2	5	46,835
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	683,35	Perairan Laut Selat Malaka	101	57	39,476	2	7	9,228
		T1.3			101	57	13,392	2	6	46,589
		T1.3			101	53	50,507	2	9	36,687
		T1.3			101	54	3,395	2	9	51,722
		T1.3			101	57	39,476	2	7	9,228
Alur Laut	Alur Pelayaran (TSS)	T1.3	747,41	Perairan Laut Selat Malaka	101	55	53,144	2	4	19,815
		T1.3			101	54	55,458	2	2	51,480
		T1.3			101	54	4,832	2	3	19,934
		T1.3			101	55	30,845	2	4	34,587
		T1.3			101	58	6,019	2	6	49,267
		T1.3			101	58	11,614	2	6	45,060
		T1.3			101	55	53,144	2	4	19,815
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	148.184,74	Perairan Laut Selat Malaka	102	16	21,332	1	43	2,520
		U8			102	23	40,907	1	38	1,307
		U8			102	25	34,838	1	37	2,376
		U8			102	33	33,419	1	33	19,987
		U8			102	42	45,035	1	28	41,084
		U8			102	43	44,240	1	28	1,747
		U8			102	44	28,726	1	27	36,197
		U8			102	44	46,401	1	27	14,104
		U8			102	44	59,958	1	26	46,234
		U8			102	45	4,688	1	26	41,039
		U8			102	46	16,434	1	26	10,141
		U8			102	46	58,677	1	25	48,605
		U8			102	51	18,911	1	22	38,178
		U8			102	58	5,033	1	17	53,030

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			103	1	3,269	1	15	28,733
		U8			103	2	4,870	1	14	55,469
		U8			103	2	2,263	1	14	47,115
		U8			103	1	1,870	1	15	0,850
		U8			102	58	37,634	1	15	21,468
		U8			102	53	17,118	1	16	18,315
		U8			102	47	51,632	1	16	23,418
		U8			102	42	34,273	1	15	24,754
		U8			102	39	47,348	1	13	57,716
		U8			102	38	52,660	1	13	7,066
		U8			102	38	27,903	1	11	27,466
		U8			102	38	39,813	1	9	21,345
		U8			102	35	40,953	1	11	33,873
		U8			102	35	24,354	1	13	15,178
		U8			102	35	9,118	1	15	37,901
		U8			102	34	13,744	1	25	0,512
		U8			102	34	6,907	1	26	26,937
		U8			102	34	5,583	1	27	25,842
		U8			102	33	51,719	1	29	3,837
		U8			102	33	46,397	1	29	12,469
		U8			102	30	28,972	1	31	52,309
		U8			102	30	13,785	1	33	30,824
		U8			102	30	8,586	1	33	39,887
		U8			102	21	34,482	1	38	37,236
		U8			102	19	48,257	1	38	48,560
		U8			102	17	32,881	1	38	44,284
		U8			102	16	32,959	1	38	11,786
		U8			102	15	19,297	1	36	25,671
		U8			102	14	52,554	1	35	6,853
		U8			102	13	54,255	1	35	8,417
		U8			102	13	54,261	1	34	14,469

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	13	44,659	1	34	18,117
		U8			102	13	19,642	1	34	13,377
		U8			102	11	48,224	1	34	20,323
		U8			102	11	47,471	1	34	4,029
		U8			102	11	2,800	1	34	10,019
		U8			102	11	3,026	1	34	26,614
		U8			102	9	2,182	1	34	42,712
		U8			102	10	48,554	1	38	35,874
		U8			101	59	35,051	1	42	40,367
		U8			101	56	49,133	1	38	11,119
		U8			101	54	10,014	1	39	44,671
		U8			101	52	53,692	1	44	40,926
		U8			101	54	21,229	1	48	0,327
		U8			101	54	50,578	1	47	57,505
		U8			101	55	58,251	1	47	40,756
		U8			101	57	14,002	1	47	2,880
		U8			101	58	17,844	1	46	22,022
		U8			101	59	53,563	1	45	9,986
		U8			102	1	0,852	1	44	32,798
		U8			102	2	1,780	1	44	20,721
		U8			102	7	7,059	1	44	14,923
		U8			102	16	21,332	1	43	2,520
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	58.093,00	Perairan Laut Selat Malaka	100	58	8,418	2	53	15,031
		U8			100	47	0,520	2	51	26,171
		U8			100	42	12,727	2	57	45,232
		U8			100	35	5,801	3	5	29,310
		U8			100	33	58,422	3	12	38,663
		U8			100	34	1,422	3	12	42,185
		U8			100	49	24,767	3	0	54,884
		U8			100	58	13,598	2	53	21,473

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			100	58	8,418	2	53	15,031
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	16.321,50	Perairan Laut Selat Malaka	102	42	7,023	1	31	0,775
		U8			102	41	46,171	1	30	24,343
		U8			102	35	31,712	1	33	19,029
		U8			102	29	57,788	1	35	59,956
		U8			102	26	21,409	1	37	38,588
		U8			102	24	40,782	1	38	28,529
		U8			102	17	14,973	1	43	35,860
		U8			102	17	38,586	1	44	8,751
		U8			102	19	1,892	1	43	47,765
		U8			102	31	57,872	1	37	28,881
		U8			102	35	46,205	1	35	0,984
		U8			102	42	7,023	1	31	0,775
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	43.178,11	Perairan Laut Selat Malaka	102	8	3,019	1	49	18,735
		U8			102	11	19,752	1	47	7,220
		U8			102	13	51,567	1	45	16,626
		U8			102	13	25,145	1	44	51,717
		U8			102	11	39,782	1	44	50,662
		U8			102	8	7,014	1	45	16,115
		U8			102	5	6,538	1	45	18,560
		U8			102	2	3,839	1	45	36,047
		U8			102	1	1,991	1	45	56,264
		U8			101	57	0,259	1	48	20,446
		U8			101	54	26,833	1	48	50,231
		U8			101	53	41,781	1	48	28,295
		U8			101	52	20,189	1	46	45,020
		U8			101	52	15,930	1	52	56,020
		U8			101	53	5,388	1	53	51,948
		U8			101	55	28,303	1	57	54,428

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			101	58	33,326	1	55	48,223
		U8			102	3	8,303	1	52	20,837
		U8			102	8	3,019	1	49	18,735
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	30.061,34	Perairan Laut Pulau Rupert	101	50	57,628	1	51	55,987
		U8			101	50	44,726	1	50	13,474
		U8			101	50	47,379	1	49	1,371
		U8			101	50	42,922	1	48	27,120
		U8			101	50	51,475	1	46	44,525
		U8			101	51	3,474	1	45	39,617
		U8			101	51	17,489	1	43	21,593
		U8			101	51	36,107	1	42	24,301
		U8			101	51	37,950	1	41	55,185
		U8			101	51	57,979	1	41	4,328
		U8			101	44	4,444	1	45	35,238
		U8			101	44	21,873	1	46	12,207
		U8			101	44	40,409	1	47	33,168
		U8			101	44	48,710	1	48	29,477
		U8			101	45	8,888	1	51	53,371
		U8			101	46	41,945	1	51	51,478
		U8			101	46	50,293	1	53	18,371
		U8			101	47	24,558	1	53	56,918
		U8			101	48	14,883	1	55	6,518
		U8			101	48	38,440	1	56	23,612
		U8			101	48	49,147	1	58	4,263
		U8			101	48	24,520	1	59	23,500
		U8			101	47	52,586	2	0	20,182
		U8			101	49	3,745	2	2	17,787
		U8			101	51	46,394	2	0	26,338
		U8			101	51	44,196	2	0	14,510
		U8			101	51	45,206	1	59	55,673

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			101	51	59,868	1	59	15,949
		U8			101	52	4,092	1	58	24,501
		U8			101	51	30,036	1	54	39,266
		U8			101	51	20,250	1	54	14,476
		U8			101	51	21,832	1	53	51,054
		U8			101	51	19,377	1	53	26,709
		U8			101	50	57,628	1	51	55,987
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	30.848,84	Perairan Laut Selat Malaka	102	28	18,445	1	40	56,621
		U8			102	27	49,256	1	40	7,616
		U8			102	22	23,251	1	42	44,085
		U8			102	19	13,854	1	44	18,104
		U8			102	16	20,914	1	45	1,879
		U8			102	11	15,424	1	47	50,007
		U8			102	8	0,981	1	49	45,820
		U8			102	3	6,255	1	52	47,929
		U8			101	58	51,760	1	56	14,980
		U8			101	55	44,811	1	58	22,517
		U8			101	56	32,869	1	59	44,194
		U8			101	58	34,115	1	58	38,622
		U8			102	0	1,209	1	57	30,767
		U8			102	2	,208	1	56	44,602
		U8			102	3	5,324	1	55	45,772
		U8			102	4	4,656	1	55	6,776
		U8			102	6	9,292	1	54	27,336
		U8			102	7	2,446	1	53	38,225
		U8			102	11	27,223	1	51	36,197
		U8			102	13	5,773	1	50	36,289
		U8			102	14	13,715	1	50	1,645
		U8			102	21	54,946	1	45	48,376
		U8			102	24	28,510	1	43	10,970

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	25	27,083	1	42	31,449
		U8			102	27	1,267	1	41	45,734
		U8			102	28	18,445	1	40	56,621
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	30.472,56	Perairan Laut Selat Malaka	101	37	5,857	2	11	49,278
		U8			101	36	51,100	2	11	48,971
		U8			101	33	33,470	2	13	4,772
		U8			101	33	26,717	2	13	10,139
		U8			101	31	50,923	2	14	38,890
		U8			101	30	38,541	2	15	59,779
		U8			101	29	52,698	2	16	41,391
		U8			101	27	55,655	2	18	56,787
		U8			101	26	55,067	2	20	15,086
		U8			101	31	38,062	2	26	46,434
		U8			101	36	11,907	2	23	19,588
		U8			101	36	46,383	2	22	4,691
		U8			101	36	43,816	2	12	24,405
		U8			101	37	42,077	2	11	50,033
		U8			101	37	5,857	2	11	49,278
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	18.992,56	Perairan Laut Selat Malaka	101	34	21,073	2	9	41,913
		U8			101	34	53,899	2	9	32,570
		U8			101	35	27,408	2	9	38,514
		U8			101	38	38,003	2	8	35,418
		U8			101	24	30,291	2	8	37,407
		U8			101	24	29,044	2	8	42,761
		U8			101	23	2,695	2	14	53,744
		U8			101	24	27,163	2	16	50,553
		U8			101	26	9,428	2	16	6,913
		U8			101	27	45,518	2	15	8,424
		U8			101	31	30,430	2	11	14,787

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			101	31	58,659	2	10	50,128
		U8			101	32	38,200	2	10	33,281
		U8			101	33	13,788	2	10	21,879
		U8			101	34	6,297	2	9	58,964
		U8			101	34	13,989	2	9	46,635
		U8			101	34	21,073	2	9	41,913
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	26.455,54	Perairan Laut Selat Malaka	101	52	12,531	2	8	32,202
		U8			101	51	25,102	2	7	14,019
		U8			101	39	14,040	2	13	36,957
		U8			101	39	25,883	2	20	53,070
		U8			101	53	37,411	2	10	11,262
		U8			101	52	12,531	2	8	32,202
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	4.071,87	Perairan Laut Selat Malaka	101	57	13,392	2	6	46,589
		U8			101	55	22,306	2	5	10,173
		U8			101	51	53,870	2	6	58,950
		U8			101	52	38,437	2	8	12,605
		U8			101	53	50,507	2	9	36,687
		U8			101	57	13,392	2	6	46,589
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	2.735,78	Perairan Laut Selat Malaka	103	13	2,965	0	57	30,774
		U8			103	10	10,000	0	55	6,387
		U8			103	10	9,998	0	59	44,999
		U8			103	11	41,798	0	59	44,999
		U8			103	12	3,545	0	58	45,292
		U8			103	12	15,527	0	58	20,516
		U8			103	12	37,486	0	57	44,687
		U8			103	13	2,965	0	57	30,774
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	887,66	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	19	20,003	1	33	10,056
		U17			102	19	30,125	1	33	9,137

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	19	52,219	1	33	18,397
		U17			102	20	9,124	1	33	21,711
		U17			102	20	27,193	1	33	14,089
		U17			102	21	21,805	1	33	6,163
		U17			102	21	34,833	1	32	59,066
		U17			102	21	55,254	1	32	54,098
		U17			102	22	12,236	1	32	52,546
		U17			102	22	59,675	1	32	41,010
		U17			102	23	31,205	1	32	37,317
		U17			102	24	36,207	1	32	22,360
		U17			102	25	31,253	1	32	0,866
		U17			102	26	1,588	1	31	54,288
		U17			102	26	13,062	1	31	47,860
		U17			102	26	55,680	1	31	37,222
		U17			102	27	27,884	1	31	25,346
		U17			102	27	21,750	1	31	9,931
		U17			102	26	51,074	1	31	21,617
		U17			102	26	7,530	1	31	32,426
		U17			102	25	57,062	1	31	38,659
		U17			102	25	25,232	1	31	45,691
		U17			102	24	32,020	1	32	6,636
		U17			102	23	28,397	1	32	21,285
		U17			102	22	56,014	1	32	25,113
		U17			102	22	9,128	1	32	36,571
		U17			102	21	25,088	1	32	43,259
		U17			102	21	20,518	1	32	45,400
		U17			102	21	22,665	1	32	48,272
		U17			102	21	18,566	1	32	50,214
		U17			102	21	9,275	1	32	51,524
		U17			102	21	6,198	1	32	45,946
		U17			102	21	6,138	1	32	51,364

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	21	3,538	1	32	53,208
		U17			102	20	26,626	1	32	57,822
		U17			102	20	25,110	1	32	51,913
		U17			102	20	18,533	1	33	0,341
		U17			102	20	10,700	1	33	1,199
		U17			102	20	7,445	1	33	5,520
		U17			102	19	33,371	1	32	52,715
		U17			102	18	34,466	1	33	1,361
		U17			102	18	33,476	1	33	22,313
		U17			102	19	2,241	1	33	19,027
		U17			102	19	20,003	1	33	10,056
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	340,27	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	16	24,524	1	34	0,961
		U3			102	16	12,064	1	33	29,220
		U3			102	16	2,211	1	33	31,480
		U3			102	15	57,655	1	33	42,433
		U3			102	15	56,515	1	33	39,723
		U3			102	15	51,853	1	33	43,765
		U3			102	15	35,200	1	33	46,976
		U3			102	15	36,196	1	34	18,839
		U3			102	16	19,131	1	35	5,009
		U3			102	16	39,389	1	35	4,565
		U3			102	16	24,524	1	34	0,961
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	2.178,21	Perairan Laut Pulau Rupat	101	48	38,014	2	2	37,872
		U8			101	47	36,920	2	0	56,900
		U8			101	46	45,511	2	1	57,046
		U8			101	46	5,893	2	2	51,655
		U8			101	45	30,558	2	3	34,485
		U8			101	44	42,373	2	4	2,325
		U8			101	44	18,880	2	5	13,826

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			101	44	2,831	2	5	45,730
		U8			101	48	38,014	2	2	37,872
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	4.055,94	Perairan Laut Pulau Rupert	101	42	58,818	2	6	29,320
		U1			101	44	2,899	2	5	45,687
		U1			101	44	17,746	2	5	17,278
		U1			101	44	42,373	2	4	2,325
		U1			101	45	30,558	2	3	34,485
		U1			101	46	5,893	2	2	51,655
		U1			101	46	45,511	2	1	57,046
		U1			101	47	36,920	2	0	56,900
		U1			101	46	35,825	1	59	15,930
		U1			101	46	45,534	1	59	31,976
		U1			101	45	35,981	2	1	4,558
		U1			101	45	13,214	2	1	39,245
		U1			101	45	2,908	2	1	49,950
		U1			101	44	57,285	2	2	2,543
		U1			101	44	33,899	2	2	35,039
		U1			101	44	13,803	2	2	52,396
		U1			101	44	2,595	2	2	57,411
		U1			101	43	51,494	2	2	58,029
		U1			101	43	41,621	2	2	51,779
		U1			101	43	35,884	2	2	52,049
		U1			101	43	27,367	2	3	7,133
		U1			101	43	11,805	2	3	56,153
		U1			101	43	9,197	2	4	18,072
		U1			101	43	9,518	2	4	50,604
		U1			101	43	0,370	2	5	17,469
		U1			101	42	54,876	2	5	23,381
		U1			101	43	4,920	2	5	35,945
		U1			101	42	28,671	2	6	12,260

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U1			101	42	22,247	2	6	2,209
		U1			101	41	17,390	2	6	44,401
		U1			101	40	18,937	2	7	14,333
		U1			101	39	38,021	2	7	39,040
		U1			101	39	42,879	2	8	3,144
		U1			101	42	58,818	2	6	29,320
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	1.485,48	Perairan Laut Pulau Rangsang	102	59	25,231	1	5	21,093
		U17			103	0	3,033	1	4	43,050
		U17			103	0	3,743	1	4	19,396
		U17			103	0	1,853	1	4	14,665
		U17			103	0	2,987	1	3	52,437
		U17			103	1	8,258	1	3	7,497
		U17			103	2	0,007	1	2	32,736
		U17			103	2	3,807	1	1	58,805
		U17			103	3	,083	1	1	34,178
		U17			103	3	4,184	1	1	16,642
		U17			103	3	7,486	1	1	8,750
		U17			103	4	4,629	1	0	7,127
		U17			103	4	2,929	0	59	52,953
		U17			103	4	9,511	0	59	35,381
		U17			103	4	8,332	0	59	16,114
		U17			103	5	0,093	0	59	6,593
		U17			103	5	0,426	0	58	41,656
		U17			103	5	9,627	0	57	49,476
		U17			103	6	4,584	0	57	28,093
		U17			103	6	8,669	0	57	0,494
		U17			103	7	3,046	0	56	32,510
		U17			103	7	0,149	0	56	21,081
		U17			103	7	2,597	0	56	7,580
		U17			103	7	5,436	0	55	49,441

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			103	7	4,925	0	55	28,160
		U17			103	8	6,583	0	55	9,567
		U17			103	9	0,817	0	54	13,644
		U17			103	8	4,343	0	54	3,230
		U17			103	8	6,666	0	54	41,975
		U17			103	8	6,579	0	54	45,285
		U17			103	8	0,906	0	54	58,305
		U17			103	7	9,347	0	55	31,479
		U17			103	7	0,624	0	55	59,262
		U17			103	7	0,054	0	56	15,236
		U17			103	7	0,187	0	56	21,419
		U17			103	6	7,304	0	56	48,823
		U17			103	6	0,536	0	57	19,691
		U17			103	5	4,414	0	57	43,314
		U17			103	5	7,210	0	58	32,275
		U17			103	4	8,107	0	58	55,665
		U17			103	4	3,607	0	59	6,830
		U17			103	4	8,326	0	59	22,812
		U17			103	4	8,438	0	59	44,575
		U17			103	4	2,354	0	59	53,030
		U17			103	4	2,472	0	59	56,392
		U17			103	3	3,018	1	0	34,027
		U17			103	3	0,696	1	1	0,498
		U17			103	3	0,990	1	1	7,229
		U17			103	2	7,761	1	1	20,139
		U17			103	2	7,695	1	1	23,715
		U17			103	2	6,143	1	1	22,232
		U17			103	2	8,488	1	1	31,347
		U17			103	2	4,355	1	1	32,534
		U17			103	2	9,334	1	1	41,377
		U17			103	2	7,370	1	1	51,547

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			103	2	0,461	1	2	3,321
		U17			103	2	0,828	1	2	10,333
		U17			103	1	6,267	1	2	21,540
		U17			103	1	1,613	1	2	25,332
		U17			103	1	8,902	1	2	21,283
		U17			103	1	6,982	1	2	21,878
		U17			103	1	1,996	1	2	27,474
		U17			103	1	2,981	1	2	31,683
		U17			103	1	5,796	1	2	38,009
		U17			103	1	3,815	1	2	37,000
		U17			103	1	1,824	1	2	42,272
		U17			103	1	9,080	1	2	41,512
		U17			103	1	9,432	1	2	45,767
		U17			103	1	7,099	1	2	54,358
		U17			103	0	9,186	1	3	19,783
		U17			103	0	4,195	1	3	24,550
		U17			103	0	0,810	1	3	22,624
		U17			103	0	2,483	1	3	26,711
		U17			103	0	0,900	1	3	54,466
		U17			103	0	2,250	1	3	58,430
		U17			103	0	0,079	1	4	3,502
		U17			103	0	2,254	1	4	6,710
		U17			103	0	0,550	1	4	31,518
		U17			102	59	25,785	1	4	57,362
		U17			102	58	58,834	1	5	20,919
		U17			102	58	53,864	1	5	17,298
		U17			102	58	55,589	1	5	22,824
		U17			102	58	53,643	1	5	25,015
		U17			102	58	36,295	1	5	34,242
		U17			102	58	40,931	1	5	50,061
		U17			102	59	0,855	1	5	39,791

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	59	25,231	1	5	21,093
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	7.403,22	Perairan Laut Pulau Rupert	101	26	39,237	2	3	38,307
		U9			101	25	47,246	2	3	6,783
		U9			101	24	30,291	2	8	37,407
		U9			101	33	15,796	2	8	36,621
		U9			101	27	54,808	2	5	46,336
		U9			101	27	54,613	2	4	6,964
		U9			101	26	39,237	2	3	38,307
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	20.452,53	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	10	40,462	1	38	1,788
		U9			102	9	2,182	1	34	42,712
		U9			102	7	0,425	1	35	28,082
		U9			102	5	9,672	1	36	8,857
		U9			102	4	0,676	1	36	25,485
		U9			102	3	3,291	1	36	34,827
		U9			102	2	8,252	1	36	41,713
		U9			102	1	7,998	1	36	38,890
		U9			102	1	0,399	1	36	31,419
		U9			102	0	1,009	1	36	25,502
		U9			102	0	4,749	1	36	10,232
		U9			101	56	49,133	1	38	11,119
		U9			101	59	35,051	1	42	40,367
		U9			102	10	48,554	1	38	35,874
		U9			102	10	40,462	1	38	1,788
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	28.891,27	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	23	49,471	1	36	33,919
		U8			102	29	58,923	1	31	34,848
		U8			102	31	25,858	1	22	12,334
		U8			102	31	31,606	1	22	4,691
		U8			102	33	59,903	1	20	17,229
		U8			102	34	37,023	1	15	33,839

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	34	52,296	1	13	10,788
		U8			102	35	3,673	1	12	1,319
		U8			102	32	51,936	1	13	37,588
		U8			102	30	39,548	1	15	9,890
		U8			102	30	46,316	1	15	24,223
		U8			102	30	46,853	1	15	44,553
		U8			102	30	40,540	1	17	21,257
		U8			102	30	30,884	1	18	30,382
		U8			102	30	11,476	1	19	57,147
		U8			102	30	6,231	1	21	12,108
		U8			102	30	2,984	1	21	21,255
		U8			102	30	4,250	1	21	38,825
		U8			102	30	0,980	1	22	11,124
		U8			102	29	54,978	1	22	39,231
		U8			102	29	52,852	1	23	13,052
		U8			102	29	51,155	1	23	49,707
		U8			102	30	0,012	1	25	50,319
		U8			102	29	55,858	1	26	7,020
		U8			102	29	44,036	1	26	24,003
		U8			102	29	34,857	1	26	30,471
		U8			102	29	44,516	1	27	11,028
		U8			102	29	57,594	1	27	42,023
		U8			102	30	2,255	1	28	9,981
		U8			102	29	57,561	1	28	20,617
		U8			102	29	26,196	1	28	52,314
		U8			102	28	26,805	1	30	30,575
		U8			102	28	52,363	1	31	34,800
		U8			102	27	42,802	1	32	2,835
		U8			102	27	26,551	1	31	25,531
		U8			102	26	55,680	1	31	37,222
		U8			102	26	13,062	1	31	47,860

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	26	1,926	1	31	54,185
		U8			102	25	31,253	1	32	0,866
		U8			102	24	36,207	1	32	22,360
		U8			102	23	31,205	1	32	37,317
		U8			102	22	59,675	1	32	41,010
		U8			102	22	12,236	1	32	52,546
		U8			102	21	55,254	1	32	54,098
		U8			102	21	34,833	1	32	59,066
		U8			102	21	23,753	1	33	5,706
		U8			102	20	27,193	1	33	14,089
		U8			102	20	10,601	1	33	21,486
		U8			102	20	1,040	1	33	21,106
		U8			102	19	30,125	1	33	9,137
		U8			102	19	20,003	1	33	10,056
		U8			102	19	2,241	1	33	19,027
		U8			102	18	33,628	1	33	22,345
		U8			102	18	33,815	1	33	1,508
		U8			102	18	24,468	1	33	8,225
		U8			102	18	13,114	1	33	8,064
		U8			102	18	4,504	1	33	14,122
		U8			102	18	2,507	1	33	11,082
		U8			102	17	55,209	1	33	9,964
		U8			102	17	49,641	1	33	12,881
		U8			102	17	31,414	1	33	12,425
		U8			102	17	30,726	1	33	9,794
		U8			102	17	32,049	1	33	28,695
		U8			102	16	56,057	1	33	28,981
		U8			102	16	46,004	1	33	36,055
		U8			102	16	18,485	1	33	45,577
		U8			102	16	24,524	1	34	0,961
		U8			102	16	39,389	1	35	4,565

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	16	19,131	1	35	5,009
		U8			102	18	20,439	1	37	15,259
		U8			102	21	10,962	1	37	55,048
		U8			102	22	38,274	1	37	22,880
		U8			102	23	15,696	1	37	1,259
		U8			102	23	49,471	1	36	33,919
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	95.875,07	Perairan Laut Pulau Rangsang	103	7	6,601	1	10	28,389
		U8			103	8	0,437	1	9	4,292
		U8			103	9	5,743	1	6	4,717
		U8			103	9	3,561	1	4	32,639
		U8			103	10	51,337	1	2	34,390
		U8			103	11	12,210	1	1	59,801
		U8			103	11	13,549	1	1	44,355
		U8			103	11	30,716	1	0	25,329
		U8			103	11	41,798	0	59	44,999
		U8			103	10	9,998	0	59	44,999
		U8			103	10	10,000	0	55	6,387
		U8			103	9	0,817	0	54	13,644
		U8			103	8	6,583	0	55	9,567
		U8			103	7	4,925	0	55	28,160
		U8			103	7	5,436	0	55	49,441
		U8			103	7	2,597	0	56	7,580
		U8			103	7	0,149	0	56	21,081
		U8			103	7	3,046	0	56	32,510
		U8			103	6	8,669	0	57	0,494
		U8			103	6	4,584	0	57	28,093
		U8			103	5	9,627	0	57	49,476
		U8			103	5	0,426	0	58	41,656
		U8			103	5	0,093	0	59	6,593
		U8			103	4	8,332	0	59	16,114

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			103	4	9,511	0	59	35,381
		U8			103	4	2,929	0	59	52,953
		U8			103	4	4,629	1	0	7,127
		U8			103	3	7,486	1	1	8,750
		U8			103	3	4,184	1	1	16,642
		U8			103	3	0,083	1	1	34,178
		U8			103	2	3,807	1	1	58,805
		U8			103	2	,007	1	2	32,736
		U8			103	1	8,258	1	3	7,497
		U8			103	0	2,987	1	3	52,437
		U8			103	0	1,853	1	4	14,665
		U8			103	0	3,743	1	4	19,396
		U8			103	0	2,087	1	4	43,868
		U8			102	59	31,092	1	5	15,701
		U8			102	59	2,257	1	5	38,857
		U8			102	58	40,931	1	5	50,061
		U8			102	58	47,128	1	6	11,200
		U8			102	57	58,828	1	6	25,544
		U8			102	57	52,685	1	6	4,586
		U8			102	57	29,335	1	6	11,121
		U8			102	54	45,216	1	7	14,970
		U8			102	54	24,372	1	7	27,202
		U8			102	53	41,334	1	7	45,959
		U8			102	53	9,675	1	7	54,054
		U8			102	52	30,052	1	8	11,031
		U8			102	50	25,932	1	8	47,070
		U8			102	49	57,955	1	8	59,777
		U8			102	49	49,003	1	8	59,675
		U8			102	49	41,747	1	8	55,198
		U8			102	49	27,593	1	8	58,311
		U8			102	49	2,613	1	9	4,598

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	48	44,558	1	9	15,131
		U8			102	48	5,016	1	9	21,698
		U8			102	47	7,105	1	9	37,220
		U8			102	46	38,787	1	9	41,068
		U8			102	46	14,872	1	9	50,209
		U8			102	45	40,203	1	9	46,174
		U8			102	45	19,463	1	9	49,642
		U8			102	45	5,111	1	9	46,668
		U8			102	44	56,564	1	9	40,245
		U8			102	44	48,984	1	9	41,865
		U8			102	44	29,133	1	9	39,518
		U8			102	44	4,694	1	9	32,311
		U8			102	43	3,390	1	8	56,592
		U8			102	42	16,515	1	8	15,791
		U8			102	41	54,935	1	8	2,141
		U8			102	41	12,001	1	7	27,267
		U8			102	39	14,832	1	8	55,095
		U8			102	39	0,403	1	11	25,225
		U8			102	39	20,847	1	12	49,649
		U8			102	40	5,090	1	13	30,348
		U8			102	42	43,181	1	14	53,314
		U8			102	47	54,388	1	15	50,899
		U8			102	53	15,244	1	15	45,784
		U8			102	58	33,167	1	14	49,216
		U8			103	1	5,503	1	14	28,838
		U8			103	4	,047	1	13	37,904
		U8			103	4	9,396	1	13	19,397
		U8			103	7	2,490	1	10	45,111
		U8			103	7	7,732	1	10	35,916
		U8			103	7	6,601	1	10	28,389

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	144,44	Perairan Laut Pulau Rupert	101	39	42,879	2	8	3,144
		U3			101	39	34,662	2	7	22,373
		U3			101	39	20,958	2	7	29,454
		U3			101	39	20,544	2	7	32,929
		U3			101	39	16,662	2	7	28,598
		U3			101	39	6,447	2	7	24,676
		U3			101	39	6,463	2	8	21,260
		U3			101	39	31,628	2	8	8,741
		U3			101	39	42,879	2	8	3,144
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	1.794,51	Perairan Laut Pulau Rupert	101	48	38,440	1	56	23,612
		U1			101	48	32,744	1	56	4,973
		U1			101	47	21,560	1	56	13,009
		U1			101	47	22,417	1	56	31,429
		U1			101	47	19,303	1	56	56,972
		U1			101	47	0,566	1	58	54,058
		U1			101	47	52,586	2	0	20,182
		U1			101	48	24,520	1	59	23,500
		U1			101	48	49,147	1	58	4,263
		U1			101	48	38,440	1	56	23,612
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	183,54	Perairan Laut Pulau Rangsang	102	58	47,128	1	6	11,200
		U18			102	58	36,295	1	5	34,242
		U18			102	58	32,936	1	5	31,817
		U18			102	58	31,355	1	5	36,941
		U18			102	58	26,670	1	5	35,350
		U18			102	58	26,989	1	5	37,425
		U18			102	58	23,098	1	5	39,121
		U18			102	58	20,999	1	5	37,586
		U18			102	57	59,110	1	5	47,177
		U18			102	57	48,043	1	5	48,750

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U18			102	57	58,828	1	6	25,544
		U18			102	58	47,128	1	6	11,200
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	473,73	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	28	52,363	1	31	34,800
		U18			102	28	19,112	1	30	11,243
		U18			102	28	5,331	1	30	36,232
		U18			102	27	50,618	1	30	55,581
		U18			102	27	35,437	1	31	6,273
		U18			102	27	21,750	1	31	9,931
		U18			102	27	42,802	1	32	2,835
		U18			102	28	52,363	1	31	34,800
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pertahanan dan Keamanan	U18	132,60	Perairan Laut Pulau Rupat	101	43	4,920	2	5	35,945
		U18			101	42	45,296	2	5	11,397
		U18			101	42	30,712	2	5	31,856
		U18			101	42	13,482	2	5	48,497
		U18			101	42	28,671	2	6	12,260
		U18			101	43	4,920	2	5	35,945
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	148,37	Perairan Laut Pulau Rangsang	103	9	4,681	0	53	28,228
		U8			103	9	2,285	0	53	15,885
		U8			103	9	1,747	0	53	34,005
		U8			103	9	6,999	0	53	48,200
		U8			103	10	9,999	0	54	24,095
		U8			103	10	9,998	0	53	43,479
		U8			103	9	4,681	0	53	28,228
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	472,60	Perairan Laut Selat Malaka	103	13	38,685	0	57	11,268
		U8			103	10	9,998	0	53	43,479
		U8			103	10	9,999	0	54	24,095
		U8			103	13	33,593	0	57	14,048
		U8			103	13	38,685	0	57	11,268

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Budidaya	U9	2.170,11	Perairan Laut Pulau Rupert	101	46	50,293	1	53	18,371
		U9			101	46	41,945	1	51	51,478
		U9			101	45	8,888	1	51	53,371
		U9			101	45	17,209	1	52	42,738
		U9			101	45	30,350	1	53	26,769
		U9			101	45	56,069	1	54	3,513
		U9			101	46	39,675	1	54	57,660
		U9			101	46	54,525	1	55	32,989
		U9			101	46	53,978	1	55	50,401
		U9			101	47	13,128	1	55	59,530
		U9			101	47	21,560	1	56	13,009
		U9			101	48	32,744	1	56	4,973
		U9			101	48	14,883	1	55	6,518
		U9			101	47	24,558	1	53	56,918
		U9			101	46	50,293	1	53	18,371
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	52,63	Perairan Laut Pulau Batu Mandi	100	36	20,191	2	57	34,360
		U8			100	37	10,332	2	56	34,127
		U8			100	36	40,424	2	57	0,645
		U8			100	36	26,872	2	56	51,702
		U8			100	36	20,191	2	57	34,360
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	754,50	Perairan Laut Pulau Batu Mandi	100	42	27,507	2	50	41,673
		U8			100	39	50,979	2	50	16,161
		U8			100	39	49,103	2	50	18,008
		U8			100	40	36,096	2	51	8,580
		U8			100	41	28,349	2	52	4,814
		U8			100	42	32,220	2	50	52,529
		U8			100	42	27,507	2	50	41,673
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	338,73	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	14	26,092	1	33	46,186

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U1			102	14	28,366	1	33	45,946
		U1			102	14	26,076	1	33	46,090
		U1			102	14	26,092	1	33	46,186
		U1			102	14	26,092	1	33	46,186
		U1			102	14	1,543	1	33	48,778
		U1			102	13	59,327	1	33	54,648
		U1			102	13	55,135	1	33	51,965
		U1			102	13	54,255	1	35	8,417
		U1			102	14	52,554	1	35	6,853
		U1			102	14	26,951	1	33	51,295
		U1			102	14	26,092	1	33	46,186
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pariwisata	U1	46,54	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	15	4,033	1	33	45,588
		U1			102	15	2,967	1	33	44,488
		U1			102	14	58,819	1	33	45,356
		U1			102	15	4,033	1	33	45,588
		U1			102	15	4,033	1	33	45,588
		U1			102	15	35,200	1	34	17,769
		U1			102	15	35,200	1	34	11,468
		U1			102	15	35,200	1	33	46,976
		U1			102	15	4,033	1	33	45,588
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	142,07	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	17	32,049	1	33	28,695
		U17			102	17	30,726	1	33	9,794
		U17			102	17	9,273	1	33	13,013
		U17			102	16	59,045	1	33	12,983
		U17			102	16	53,578	1	33	10,343
		U17			102	16	45,383	1	33	12,015
		U17			102	16	44,065	1	33	15,353
		U17			102	16	23,406	1	33	21,503
		U17			102	16	12,064	1	33	29,220

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	16	18,485	1	33	45,577
		U17			102	16	46,004	1	33	36,055
		U17			102	16	56,057	1	33	28,981
		U17			102	17	32,049	1	33	28,695
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pelabuhan Nasional	U3	3,95	Perairan Laut Pulau Rupert	101	38	24,185	2	6	53,603
		U3			101	38	18,811	2	6	50,128
		U3			101	38	18,632	2	6	51,821
		U3			101	38	13,529	2	6	46,115
		U3			101	38	11,166	2	6	50,205
		U3			101	38	22,752	2	6	55,636
		U3			101	38	24,185	2	6	53,603
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	1.504,89	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	30	40,540	1	17	21,257
		U17			102	30	46,853	1	15	44,553
		U17			102	30	46,316	1	15	24,223
		U17			102	30	39,548	1	15	9,890
		U17			102	30	25,511	1	15	19,732
		U17			102	30	30,482	1	15	27,541
		U17			102	30	28,496	1	15	40,298
		U17			102	30	30,679	1	15	44,553
		U17			102	30	28,641	1	15	46,281
		U17			102	30	28,443	1	16	1,389
		U17			102	30	20,727	1	16	1,061
		U17			102	30	27,566	1	16	3,251
		U17			102	30	28,434	1	16	8,682
		U17			102	30	26,520	1	16	39,947
		U17			102	30	24,826	1	16	45,574
		U17			102	30	20,748	1	16	45,819
		U17			102	30	25,572	1	16	47,086
		U17			102	30	24,452	1	17	19,574

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	30	13,187	1	18	35,529
		U17			102	30	7,314	1	18	58,737
		U17			102	30	1,149	1	19	1,139
		U17			102	30	5,048	1	19	2,300
		U17			102	30	5,122	1	19	4,707
		U17			102	29	56,042	1	19	52,284
		U17			102	29	55,065	1	19	55,735
		U17			102	29	48,716	1	19	56,733
		U17			102	29	55,362	1	19	58,556
		U17			102	29	54,941	1	20	15,058
		U17			102	29	50,931	1	20	23,552
		U17			102	29	52,206	1	20	35,636
		U17			102	29	46,355	1	20	36,299
		U17			102	29	51,217	1	20	39,578
		U17			102	29	50,135	1	21	10,513
		U17			102	29	47,067	1	21	14,837
		U17			102	29	43,502	1	21	15,040
		U17			102	29	46,562	1	21	16,537
		U17			102	29	48,179	1	21	36,995
		U17			102	29	44,936	1	21	41,003
		U17			102	29	47,201	1	21	43,243
		U17			102	29	45,633	1	22	2,667
		U17			102	29	41,001	1	22	19,679
		U17			102	29	38,315	1	22	50,162
		U17			102	29	32,177	1	22	51,653
		U17			102	29	38,152	1	22	54,127
		U17			102	29	38,389	1	22	58,695
		U17			102	29	34,870	1	23	47,601
		U17			102	29	36,897	1	24	27,292
		U17			102	29	31,895	1	24	30,164
		U17			102	29	37,480	1	24	32,919

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	29	38,654	1	24	44,817
		U17			102	29	36,494	1	24	50,398
		U17			102	29	41,307	1	24	59,815
		U17			102	29	43,923	1	25	48,643
		U17			102	29	40,748	1	26	0,484
		U17			102	29	31,204	1	26	2,916
		U17			102	29	31,949	1	26	13,186
		U17			102	29	18,186	1	26	20,390
		U17			102	29	12,386	1	26	26,215
		U17			102	29	13,328	1	26	35,124
		U17			102	29	20,255	1	26	37,467
		U17			102	29	27,476	1	27	10,411
		U17			102	29	41,031	1	27	43,286
		U17			102	29	46,178	1	28	8,191
		U17			102	29	12,129	1	28	43,948
		U17			102	28	22,348	1	30	4,988
		U17			102	28	19,112	1	30	11,243
		U17			102	28	26,805	1	30	30,575
		U17			102	29	26,196	1	28	52,314
		U17			102	29	57,311	1	28	20,909
		U17			102	30	2,164	1	28	10,673
		U17			102	29	57,594	1	27	42,023
		U17			102	29	44,516	1	27	11,028
		U17			102	29	34,857	1	26	30,471
		U17			102	29	44,036	1	26	24,003
		U17			102	29	55,858	1	26	7,020
		U17			102	30	0,012	1	25	50,319
		U17			102	29	51,155	1	23	49,707
		U17			102	29	52,852	1	23	13,052
		U17			102	29	54,978	1	22	39,231
		U17			102	30	0,980	1	22	11,124

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	30	4,250	1	21	38,825
		U17			102	30	2,984	1	21	21,255
		U17			102	30	6,231	1	21	12,108
		U17			102	30	11,476	1	19	57,147
		U17			102	30	30,884	1	18	30,382
		U17			102	30	40,540	1	17	21,257
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	115,29	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	11	3,026	1	34	26,614
		U17			102	11	2,800	1	34	10,019
		U17			102	9	8,562	1	34	26,838
		U17			102	9	2,182	1	34	42,712
		U17			102	11	3,026	1	34	26,614
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	203,10	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	11	48,224	1	34	20,323
		U17			102	13	19,642	1	34	13,377
		U17			102	13	44,659	1	34	18,117
		U17			102	13	54,261	1	34	14,469
		U17			102	13	53,888	1	33	53,306
		U17			102	13	47,864	1	33	55,859
		U17			102	13	43,954	1	34	1,854
		U17			102	13	39,660	1	33	58,424
		U17			102	13	19,467	1	33	57,066
		U17			102	11	47,471	1	34	4,029
		U17			102	11	48,224	1	34	20,323
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	1.699,33	Perairan Laut Pulau Rangsang	102	46	14,117	1	9	50,288
		U17			102	46	38,787	1	9	41,068
		U17			102	47	7,105	1	9	37,220
		U17			102	48	5,016	1	9	21,698
		U17			102	48	44,558	1	9	15,131
		U17			102	49	2,613	1	9	4,598
		U17			102	49	27,593	1	8	58,311

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	49	41,747	1	8	55,198
		U17			102	49	49,003	1	8	59,675
		U17			102	49	57,955	1	8	59,777
		U17			102	50	25,932	1	8	47,070
		U17			102	52	30,052	1	8	11,031
		U17			102	53	9,675	1	7	54,054
		U17			102	53	41,334	1	7	45,959
		U17			102	54	24,665	1	7	27,058
		U17			102	54	36,259	1	7	18,873
		U17			102	56	13,080	1	6	39,395
		U17			102	57	52,685	1	6	4,586
		U17			102	57	48,043	1	5	48,750
		U17			102	57	24,078	1	5	55,619
		U17			102	54	34,531	1	7	1,568
		U17			102	54	19,527	1	7	9,127
		U17			102	54	17,441	1	7	12,494
		U17			102	53	35,511	1	7	30,772
		U17			102	53	7,740	1	7	37,410
		U17			102	52	25,074	1	7	55,543
		U17			102	50	37,357	1	8	26,523
		U17			102	50	11,338	1	8	36,508
		U17			102	50	7,936	1	8	35,113
		U17			102	49	53,936	1	8	44,009
		U17			102	49	55,692	1	8	40,012
		U17			102	49	47,214	1	8	38,344
		U17			102	49	24,034	1	8	42,431
		U17			102	48	54,219	1	8	50,106
		U17			102	48	40,372	1	8	59,407
		U17			102	48	37,024	1	8	58,119
		U17			102	48	1,654	1	9	5,764
		U17			102	47	3,950	1	9	21,255

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	46	37,954	1	9	23,742
		U17			102	46	24,033	1	9	30,334
		U17			102	46	21,213	1	9	28,440
		U17			102	46	20,137	1	9	31,181
		U17			102	46	15,766	1	9	31,110
		U17			102	46	12,814	1	9	34,063
		U17			102	46	8,157	1	9	30,782
		U17			102	46	3,314	1	9	30,862
		U17			102	46	1,517	1	9	27,721
		U17			102	46	0,137	1	9	33,384
		U17			102	45	43,813	1	9	30,279
		U17			102	45	41,995	1	9	27,334
		U17			102	45	21,577	1	9	33,503
		U17			102	45	11,300	1	9	31,628
		U17			102	45	2,280	1	9	24,372
		U17			102	44	52,886	1	9	23,031
		U17			102	44	49,337	1	9	25,590
		U17			102	44	41,936	1	9	22,427
		U17			102	44	31,319	1	9	23,389
		U17			102	44	24,691	1	9	18,753
		U17			102	44	21,052	1	9	21,518
		U17			102	44	18,383	1	9	15,643
		U17			102	44	11,377	1	9	17,487
		U17			102	43	55,514	1	9	5,450
		U17			102	43	37,778	1	8	58,579
		U17			102	43	12,953	1	8	43,464
		U17			102	42	35,190	1	8	12,550
		U17			102	42	25,268	1	8	1,516
		U17			102	42	4,473	1	7	48,996
		U17			102	41	25,559	1	7	17,105
		U17			102	41	12,001	1	7	27,267

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	41	54,935	1	8	2,141
		U17			102	42	16,515	1	8	15,791
		U17			102	43	3,390	1	8	56,592
		U17			102	44	4,318	1	9	32,133
		U17			102	44	29,133	1	9	39,518
		U17			102	44	48,984	1	9	41,865
		U17			102	44	56,564	1	9	40,245
		U17			102	45	5,111	1	9	46,668
		U17			102	45	19,463	1	9	49,642
		U17			102	45	40,203	1	9	46,174
		U17			102	46	14,117	1	9	50,288
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	51,64	Perairan Laut Pulau Rangsang	103	9	2,285	0	53	15,885
		U17			103	9	6,742	0	53	11,353
		U17			103	9	6,854	0	53	26,556
		U17			103	9	3,943	0	53	37,301
		U17			103	9	6,999	0	53	48,200
		U17			103	9	1,747	0	53	34,005
		U17			103	9	2,285	0	53	15,885
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	290,80	Perairan Laut Pulau Rupert	101	42	22,247	2	6	2,209
		U17			101	42	13,482	2	5	48,497
		U17			101	41	9,300	2	6	30,304
		U17			101	40	3,828	2	7	4,326
		U17			101	39	34,662	2	7	22,373
		U17			101	39	38,021	2	7	39,040
		U17			101	40	18,937	2	7	14,333
		U17			101	41	17,390	2	6	44,401
		U17			101	42	22,247	2	6	2,209
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	716,05	Perairan Laut Pulau Rupert	101	43	35,884	2	2	52,049
		U17			101	43	38,769	2	2	51,252

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			101	43	53,124	2	2	58,269
		U17			101	44	10,409	2	2	54,410
		U17			101	44	33,899	2	2	35,039
		U17			101	44	57,285	2	2	2,543
		U17			101	45	2,908	2	1	49,950
		U17			101	45	13,214	2	1	39,245
		U17			101	45	35,981	2	1	4,558
		U17			101	46	45,534	1	59	31,976
		U17			101	46	35,825	1	59	15,930
		U17			101	46	24,441	1	59	34,999
		U17			101	45	46,861	2	0	22,212
		U17			101	45	0,175	2	1	29,608
		U17			101	44	49,124	2	1	38,695
		U17			101	44	43,788	2	1	53,565
		U17			101	44	21,504	2	2	24,576
		U17			101	44	17,647	2	2	24,617
		U17			101	44	17,040	2	2	29,032
		U17			101	43	57,905	2	2	41,832
		U17			101	43	55,813	2	2	40,028
		U17			101	43	54,651	2	2	42,063
		U17			101	43	51,520	2	2	36,789
		U17			101	43	37,900	2	2	32,164
		U17			101	43	33,068	2	2	36,018
		U17			101	43	24,177	2	2	35,744
		U17			101	43	17,221	2	2	39,171
		U17			101	43	21,191	2	2	45,125
		U17			101	43	11,177	2	3	3,558
		U17			101	42	54,268	2	4	1,029
		U17			101	42	53,925	2	4	45,843
		U17			101	42	51,531	2	4	52,052
		U17			101	42	47,356	2	4	53,629

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			101	42	48,576	2	5	2,587
		U17			101	42	45,296	2	5	11,397
		U17			101	42	54,876	2	5	23,381
		U17			101	43	0,179	2	5	17,888
		U17			101	43	9,113	2	4	52,384
		U17			101	43	10,398	2	4	2,618
		U17			101	43	29,195	2	3	2,878
		U17			101	43	35,884	2	2	52,049
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	233,25	Perairan Laut Pulau Rupert	101	47	0,567	1	58	54,053
		U17			101	47	19,303	1	56	56,972
		U17			101	47	22,417	1	56	31,429
		U17			101	47	21,560	1	56	13,009
		U17			101	47	4,912	1	56	14,888
		U17			101	47	5,792	1	56	35,344
		U17			101	46	47,847	1	58	32,420
		U17			101	47	0,567	1	58	54,053
		U17			101	47	0,567	1	58	54,053
		U17			101	47	0,566	1	58	54,058
		U17			101	47	3,870	1	58	59,670
		U17			101	47	0,567	1	58	54,053
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	487,05	Perairan Laut Pulau Rupert	101	45	17,209	1	52	42,738
		U17			101	45	8,888	1	51	53,371
		U17			101	44	51,870	1	51	53,717
		U17			101	45	1,271	1	52	45,725
		U17			101	45	15,485	1	53	34,401
		U17			101	45	42,333	1	54	13,228
		U17			101	46	25,449	1	55	5,454
		U17			101	46	38,791	1	55	36,877
		U17			101	46	38,091	1	55	47,331

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			101	46	36,559	1	55	50,133
		U17			101	46	27,992	1	55	51,161
		U17			101	46	27,581	1	56	0,413
		U17			101	46	54,428	1	56	7,183
		U17			101	47	4,912	1	56	14,888
		U17			101	47	21,560	1	56	13,009
		U17			101	47	13,128	1	55	59,530
		U17			101	46	53,978	1	55	50,401
		U17			101	46	54,525	1	55	32,989
		U17			101	46	39,675	1	54	57,660
		U17			101	45	56,069	1	54	3,513
		U17			101	45	30,350	1	53	26,769
		U17			101	45	17,209	1	52	42,738
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	589,48	Perairan Laut Pulau Rupert	101	44	21,873	1	46	12,207
		U17			101	44	4,444	1	45	35,238
		U17			101	43	49,513	1	45	43,780
		U17			101	43	55,440	1	45	50,778
		U17			101	44	6,340	1	46	16,755
		U17			101	44	24,477	1	47	35,995
		U17			101	44	32,770	1	48	32,543
		U17			101	44	51,283	1	51	51,596
		U17			101	44	51,870	1	51	53,717
		U17			101	45	8,888	1	51	53,371
		U17			101	44	48,710	1	48	29,477
		U17			101	44	40,409	1	47	33,168
		U17			101	44	21,873	1	46	12,207
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	224,22	Perairan Laut Pulau Rupert	101	27	48,172	2	3	48,460
		U17			101	27	44,698	2	3	41,469
		U17			101	27	42,136	2	3	44,531

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			101	27	40,486	2	3	42,180
		U17			101	27	33,158	2	3	42,011
		U17			101	27	9,289	2	3	33,537
		U17			101	27	5,630	2	3	29,106
		U17			101	27	1,973	2	3	30,219
		U17			101	26	55,628	2	3	22,775
		U17			101	26	52,225	2	3	24,986
		U17			101	26	45,930	2	3	23,487
		U17			101	25	51,179	2	2	49,886
		U17			101	25	47,246	2	3	6,783
		U17			101	26	39,237	2	3	38,307
		U17			101	27	54,613	2	4	6,964
		U17			101	27	54,580	2	3	50,326
		U17			101	27	48,172	2	3	48,460
Kawasan Pemanfaatan Umum	Pengelolaan Ekosistem Pesisir	U17	920,50	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	4	0,676	1	36	25,485
		U17			102	5	9,672	1	36	8,857
		U17			102	7	0,425	1	35	28,082
		U17			102	9	2,182	1	34	42,712
		U17			102	9	8,562	1	34	26,838
		U17			102	7	5,693	1	35	12,511
		U17			102	5	5,095	1	35	53,243
		U17			102	4	6,588	1	36	9,735
		U17			102	3	0,844	1	36	18,735
		U17			102	2	7,606	1	36	24,900
		U17			102	1	8,297	1	36	25,218
		U17			102	1	8,182	1	36	22,408
		U17			102	1	1,521	1	36	15,384
		U17			102	0	6,872	1	36	10,330
		U17			102	0	9,465	1	36	1,579
		U17			102	0	4,749	1	36	10,232

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U17			102	0	1,009	1	36	25,502
		U17			102	1	,399	1	36	31,419
		U17			102	1	7,998	1	36	38,890
		U17			102	2	8,252	1	36	41,713
		U17			102	3	3,291	1	36	34,827
		U17			102	4	0,676	1	36	25,485
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	1.012,71	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	18	3,012	1	37	43,535
		U8			102	15	35,708	1	35	5,960
		U8			102	15	26,469	1	35	6,151
		U8			102	15	48,077	1	36	10,468
		U8			102	16	53,955	1	37	46,471
		U8			102	17	40,087	1	38	12,101
		U8			102	19	47,334	1	38	15,984
		U8			102	20	8,604	1	38	13,919
		U8			102	18	3,012	1	37	43,535
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	492,70	Perairan Laut Selat Malaka	102	29	43,126	1	33	17,425
		U8			102	29	51,572	1	32	22,585
		U8			102	26	15,991	1	35	17,096
		U8			102	29	43,126	1	33	17,425
Kawasan Pemanfaatan Umum	Perikanan Tangkap	U8	6.328,28	Perairan Laut Pulau Bengkalis	102	33	52,441	1	23	19,335
		U8			102	34	6,502	1	20	52,565
		U8			102	31	56,003	1	22	27,130
		U8			102	30	36,322	1	31	4,573
		U8			102	33	2,270	1	29	6,414
		U8			102	33	21,315	1	28	50,995
		U8			102	33	28,971	1	27	54,814
		U8			102	33	33,672	1	27	18,656
		U8			102	33	34,593	1	26	25,192
		U8			102	33	45,703	1	24	4,760

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		U8			102	33	52,441	1	23	19,335
Kawasan Konservasi	Konservasi	C	5.088,01	Perairan Laut Pulau Batu Mandi	100	41	49,005	2	52	27,043
		C			100	39	49,103	2	50	18,008
		C			100	37	41,254	2	52	23,828
		C			100	36	39,480	2	55	31,209
		C			100	36	26,872	2	56	51,702
		C			100	36	40,424	2	57	0,645
		C			100	41	49,005	2	52	27,043
Kawasan Konservasi	Konservasi	C	14.113,12	Perairan Laut Pulau Rupa	101	35	9,993	2	5	0,712
		C			101	35	10,083	2	4	59,138
		C			101	35	7,227	2	4	54,420
		C			101	35	9,993	2	5	0,712
		C			101	35	9,993	2	5	0,712
		C			101	35	9,886	2	5	2,586
		C			101	35	10,602	2	5	2,096
		C			101	35	9,993	2	5	0,712
		C			101	35	9,886	2	5	2,586
		C			101	35	8,588	2	5	3,474
		C			101	35	3,063	2	4	50,791
		C			101	35	5,626	2	4	48,276
		C			101	35	2,495	2	4	46,850
		C			101	35	1,699	2	4	37,513
		C			101	35	8,569	2	4	49,298
		C			101	35	1,840	2	4	32,943
		C			101	34	23,331	2	4	8,125
		C			101	34	21,171	2	3	55,218
		C			101	34	18,315	2	3	52,109
		C			101	34	19,842	2	3	47,574
		C			101	34	7,593	2	3	38,093

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		C			101	34	4,388	2	3	23,130
		C			101	34	5,939	2	3	20,276
		C			101	33	59,420	2	3	10,704
		C			101	34	0,346	2	3	3,326
		C			101	33	52,316	2	2	52,864
		C			101	33	56,155	2	2	40,747
		C			101	33	48,993	2	2	35,518
		C			101	33	36,191	2	2	42,911
		C			101	33	21,855	2	2	35,004
		C			101	33	19,234	2	2	36,803
		C			101	33	21,598	2	2	39,784
		C			101	33	17,855	2	2	48,244
		C			101	33	16,624	2	2	43,939
		C			101	32	50,339	2	2	24,817
		C			101	32	23,833	2	2	22,506
		C			101	31	30,261	2	2	8,751
		C			101	31	17,385	2	1	49,877
		C			101	30	59,482	2	1	39,940
		C			101	30	57,683	2	1	44,052
		C			101	31	0,767	2	1	48,592
		C			101	30	58,626	2	1	49,791
		C			101	31	7,877	2	1	58,957
		C			101	31	7,450	2	2	7,904
		C			101	30	55,074	2	2	28,320
		C			101	30	26,809	2	2	59,934
		C			101	30	15,198	2	3	5,241
		C			101	30	13,282	2	3	8,391
		C			101	30	8,640	2	3	8,030
		C			101	30	5,836	2	3	11,894
		C			101	30	2,397	2	3	12,405
		C			101	29	59,316	2	3	8,477

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		C			101	29	54,725	2	3	17,994
		C			101	29	42,788	2	3	25,499
		C			101	29	18,686	2	3	34,811
		C			101	29	5,945	2	3	43,884
		C			101	28	39,221	2	3	54,938
		C			101	28	32,475	2	3	53,786
		C			101	28	26,782	2	3	56,633
		C			101	28	5,439	2	3	50,710
		C			101	27	54,580	2	3	50,326
		C			101	27	54,808	2	5	46,336
		C			101	33	15,796	2	8	36,621
		C			101	38	38,003	2	8	35,418
		C			101	39	6,463	2	8	21,260
		C			101	39	6,447	2	7	24,676
		C			101	38	54,218	2	7	19,849
		C			101	38	43,575	2	7	9,959
		C			101	38	42,296	2	7	3,850
		C			101	38	36,492	2	7	4,336
		C			101	38	24,185	2	6	53,603
		C			101	38	22,752	2	6	55,636
		C			101	38	11,166	2	6	50,205
		C			101	38	13,529	2	6	46,115
		C			101	38	6,546	2	6	32,043
		C			101	37	40,513	2	6	25,205
		C			101	37	35,082	2	6	19,940
		C			101	37	29,904	2	6	20,999
		C			101	37	14,085	2	6	14,710
		C			101	37	11,429	2	6	17,879
		C			101	37	13,284	2	6	19,570
		C			101	37	3,963	2	6	19,815
		C			101	36	45,625	2	6	14,222

Kawasan	Zona	Kode	Luasan (Ha)	Lokasi	Lintang Selatan			Bujur Timur		
					Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik
		C			101	35	59,976	2	5	49,512
		C			101	35	46,025	2	5	39,140
		C			101	35	39,608	2	5	31,085
		C			101	35	24,471	2	5	22,745
		C			101	35	13,795	2	5	13,466
		C			101	35	9,606	2	5	7,499
		C			101	35	9,886	2	5	2,586

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL TERTENTU
GUGUS PULAU-PULAU KECIL TERLUAR PROVINSI RIAU

RINCIAN INDIKASI PROGRAM UTAMA RENCANA PEMANFAATAN RUANG LAUT

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
1.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG LAUT							
A.1	Rencana Konektivitas							
a.	Pembangunan dermaga	Pulau Batumandi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pemerintah Daerah	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran berupa menara suar	Pulau Batumandi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pehubungan, dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

[illegible]

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
a.	Sosialisasi Rencana Zonasi KSNT dan Program Pembangunan Gugus PPKT Provinsi Riau	Pulau Rupat, Pulau Batamandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah				
a.	Pengurusan perizinan pemanfaatan raung laut dan PPKT	Pulau Rupat, Pulau Batamandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pembangunan tanda simbol/batas negara	Pulau Rupat, Pulau Batamandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Pertahanan dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Revitalisasi tanda simbol/batas negara	Pulau Rupat, Pulau Batamandi, Pulau Bengkalis dan Pulau Rangsang	Kementerian Pertahanan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Penempatan pos dan satuan petugas pertahanan kemanan dan sarana pendukung lainnya	Pulau Rupat, Pulau Batamandi, Pulau	Tentara Nasional Indonesia dan Badan Nasional	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
		Bengkalis dan Pulau Rangsang	Pengelola Perbatasan					
A	Kawasan Pemanfaatan Umum							
A.1	Zona Pariwisata							
a.	Pengalokasian ruang untuk kegiatan pariwisata bahari pada perairan di sekitar Kecamatan Rupat Utara, Pupat dan Bantan	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Penyiapan regulasi tentang aktivitas wisata bahari	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
			Pemerintah Daerah, dan Masyarakat					
c.	Penyusunan paket kegiatan pariwisata ekowisata	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pelatihan pengelolaan wisata masyarakat	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pembangunan akomodasi wisata	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Pembangunan sarana umum untuk kegiatan wisata	U1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
A.2	Zona Pelabuhan Nasional							
a.	Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan	U3	Kementerian Perhubungan	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan dikawasan perairan di sekitar Kecamatan Rupert Utara, Bantan dan Rangsang Pesisir	U3	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pembangunan sarana penunjang kepelabuhan dan penataan bangunan di wilayah pelabuhan	U3	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengelolaan area tambat labuh dan lego jangkar	U3	Kementerian Perhubungan, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pengembangan dan peningkatan transportasi laut sebagai penunjang sistem logistik	U3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
f.	Pengembangan jasa-jasa kelautan	U3	Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah				
A.3	Zona Perikanan Tangkap							
a	Pengalokasian ruang untuk kegiatan perikanan tangkap pada sebagian perairan KSNT Gugus PPKT Provinsi Riau	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan, metode penangkapan ikan, dan alat penangkapan ikan serta perizinan di bidang perikanan tangkap	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c	Pelatihan pengolahan hasil perikanan tangkap	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d	Pengawasan kegiatan penangkapan ikan dan pencegahan tindakan tindak pidana penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak sesuai ketentuan penangkapan ikan	U8	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
A.4	Zona Perikanan Budidaya							
a	Pengalokasian ruang untuk kegiatan budidaya perairan di sekitar Kecamatan Rupert Utara, Rupert dan Bengkalis	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b	Sosialisasi mengenai zona budidaya perairan, metode budidaya yang diizinkan, dan perizinan di bidang perikanan budidaya	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c	Pelatihan pengolahan hasil perikanan budidaya	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c	Pengembangan budidaya ikan skala kecil	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d	Pengembangan budidaya rumput laut	U9	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
A.5	Zona Pengelolaan Ekosistem Pesisir							
a.	Rehabilitasi mangrove dan lingkungan pesisir	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pengembangan dan peningkatan kegiatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan untuk perlindungan dan pemanfaatan ekosistem mangrove	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Pengembangan dan peningkatan kegiatan untuk nelayan kecil, dan pembudi daya ikan kecil	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata mangrove	U17	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
A.6	Zona Pertahanan dan Keamanan							
a.	Penetapan dan penentuan lebar laut teritorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen	U18	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
			Kelautan dan Perikanan, dan Tentara Nasional Indonesia					
b.	Penyediaan ruang laut untuk pertahanan dan keamanan	U18	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
c.	Kerjasama dengan negara lain di bidang pertahanan dan keamanan	U18	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Peningkatan dan memperkuat peralatan radar militer di PPKT	U18	Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Penyediaan ruang laut untuk pembuangan amunisi	U18	Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Tentara Nasional Indonesia	APBN, dan/atau sumber lain yang sah				
B	Kawasan Konservasi							
a.	Pemantapan tata batas kawasan konservasi	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan zonasi Kawasan Konservasi dan regulasi pendukung	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
c.	Sosialisasi mengenai konservasi perairan dan alur migrasi biota	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Sosialisasi mengenai daerah penangkapan ikan, daerah larangan penangkapan, metode penangkapan ikan, dan alat penangkapan ikan	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pembentukan kelembagaan konservasi/patroli pengelolaan zona perlindungan dan pelestarian migrasi biota langka	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
f.	Pemantapan tata batas kawasan konservasi perairan	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Rehabilitasi mangrove	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
C	Alur Laut							
a.	Pengelolaan dan pengamanan jalur pelayaran	T1.2	Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
b.	Pemantapan tata batas untuk alur pelayaran yang terbagi menjadi alur	T1.2	Kementerian Perhubungan,	APBN, APBD, dan/atau				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
	pelayaran internasional, koridor pelayaran NKRI dan Malaysia, alur pelayaran nasional, alur pelayaran regional, alur pelayaran lokal, alur pelayaran lokal untuk kegiatan kepariwisataan		Pemerintah Daerah, dan Masyarakat	sumber lain yang sah				
c.	Menyediakan ruang laut untuk alur kabel bawah laut untuk kegiatan ketenagalistrikan	T3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
d.	Menyediakan ruang laut untuk alur kabel bawah laut untuk kegiatan telekomunikasi	T3	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
e.	Pengamanan dan pengelolaan jalur kabel bawah laut untuk kegiatan	T3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,	APBN, APBD, dan/atau				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020–2024)	(2025–2029)	(2030–2034)	(2035–2039)
	ketenagalistrikan dan telekomunikasi		Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	sumber lain yang sah				
f.	Identifikasi kabel bawah laut eksisting dan rencana pemasangan kabel bawah laut	T3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				
g.	Penggambaran koridor kabel bawah laut		Tentara Nasional Indonesia dan Masyarakat	APBN dan/atau				

NO	USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI PROGRAM	PELAKSANA PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN			
					TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV
					(2020-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)
				sumber lain yang sah				
h.	Penentuan koridor pemasangan atau penempatan kabel bawah laut	T3	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Masyarakat	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah				

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO